

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN  
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA  
DI KOTA PANGKAL PINANG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**HARYADI**

**NIM. 015535602**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2011**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Januari 2011

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
PAPIR MEMBRANON BARUSA  
TIGA  
ADE6DAAF514102151  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

(Haryadi)

NIM. 015535602





## ABSTRAK

### EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KOTA PANGKALPINANG

Haryadi

Universitas Terbuka

haryadi.sahari@yahoo.com

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manfaat atau hasil program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama, tingkat keberhasilannya, dan efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Implementasi program dilakukan melalui proses komunikasi, disposisi, pengelolaan sumber daya manusia dan struktur birokrasi. Sosialisasi dan koordinasi merupakan kata kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Pemahaman terhadap program juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan atau monitoring yang dilaksanakan merupakan bentuk kendali dan evaluasi terhadap program.

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan tentang pelaksanaan program, mengenai keberhasilan, dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi selama program tersebut dilaksanakan.

Subjek penelitian adalah dinas kesejahteraan sosial provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini adalah para pelaksana program yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan staf serta kelompok usaha bersama dengan sampel yang dipilih sebanyak 50 (lima puluh) kelompok yang produktif dan 5 (lima) kelompok yang tidak produktif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kurangnya pemahaman program, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi program menyebabkan buruknya tata kelola program. Sehingga berdasarkan hasil analisis secara umum tujuan pelaksanaan program tidak dapat tercapai. Terlihat bahwa program yang dijalankan hanya mengejar target. Tidak ada data pasti tentang keberhasilan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama belum memberikan manfaat yang signifikan dan belum menunjukkan keberhasilan. Sehingga disimpulkan bahwa program tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin di Pangkalpinang.

Kata Kunci : pemahaman, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan/ monitoring



**ABSTRACT****EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL EMPOWERMENT PROGRAM OF THE POOR THROUGH JOINT BUSINESS GROUP AT PANGKALPINANG MUNICIPALITY**

Haryadi

Open Learning University

Haryadisahari@yahoo.com

This research was conducted to determine how were benefits or outcomes of social empowerment of the poor attained through joint business group in Pangkalpinang; the success rate, and the program's effectiveness in improving the economic well-being of the poor. The program was implemented through the communication process, disposition, management of human resources and bureaucratic structure. Dissemination and coordination were the key words in the success of program implementation. Understanding of the program was also very influential in its execution. Meanwhile, supervision or monitoring were carried out in a form of control and evaluation of the implementation of these programs.

This study used evaluative method, employing qualitative approach. The evaluation undertaker in this research was an activity of the program implementation, its success, and its obstacles or barriers occurred during the programs implementation.

Responden of this research were social welfare services of the Islands of Bangka Belitung Province. In this regard they were those who executed programs directly or indirectly involved in the implementation of the program which consists of the heads, chief, section chief, and staff, and business groups selected of 50 (fifty) as samples a productive group; and 5 (five) groups that are not productive ones.

The analysis showed that factors dealing with : lack of understanding of the program, dissemination, coordination and supervision of implementation of the program caused a bad governance of the program. So that based on the analysis of the general purpose of the program was not successfully achieved. It seems that the programs was executed just to touch the target. There was no definite data about the success of social empowerment of poor communities through joint business group in improving the quality of life and their social welfare.

In conclusion, this study showed that social empowerment of the poor through joint business group has not given the benefits yet significantly. Thus it the program has not been effective yet in improving the social-economic welfare of the poor in Pangkalpinang.

**Keywords :** comprehension, socialization, coordination, and supervision/monitoring



## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang

Penyusun TAPM : HARYADI

NIM : 015535602

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Fachrurrozi Sjarkowi  
NIP.19510625 197602 1 001

Prof. Dr. H. Udin. S. Winataputra, MA  
NIP.19451007 197302 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP,

Direktur Program Pascasarjana,

Dra. Susanti, M.Si  
NIP. 19671214 199303 2 002



Suciati, M.Sc. Ph.D  
NIP.19520213 198503 2 000



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

NAMA : HARYADI  
 NIM : 015535602  
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK  
 JUDUL TAPM : EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM  
 PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN  
 MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA  
 DI KOTA PANGKALPINANG

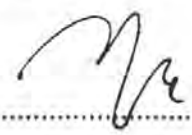
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 01 Mei 2011  
 Waktu : 13.00 – 15.00

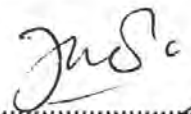
Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TESIS**


Ketua Komisi Penguji  
 Dr. Maman Ruman'a, M.Si

:   
 .....

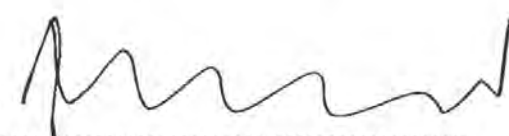
Penguji Ahli  
 Dr. Andreo Wahyudi Atmoko, M.Si

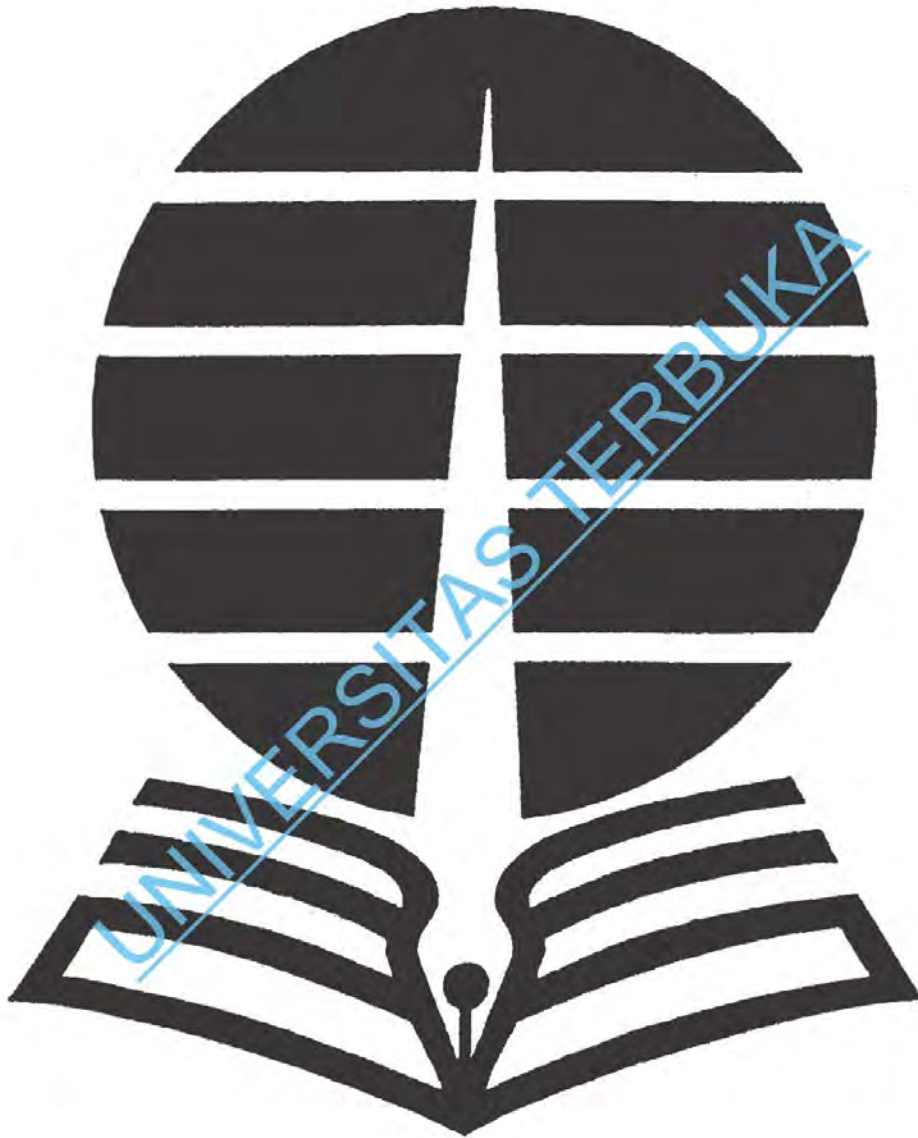
:   
 .....

Pembimbing I  
 Prof.Dr. H.Fachrurrozi Sjarkowi

:   
 .....

Pembimbing II  
 Prof.Dr.H.Udin Saripudin Winataputra, MA

:   
 .....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-NYA penulis diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister ini.

Adapun maksud penulisan TAPM ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan atau penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc, Ph.D;
2. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara Program Pascasarjana Dr. Maman Rumanta, M.Si;
3. Prof. Dr. H. Fachrurrozie Syarkowi selaku Pembimbing I dan Prof. Dr.H.Udin.S.Winataputra, MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini;
4. Ketua Bidang Program Magister Administrasi Publik selaku penanggungjawab program Magister Administrasi Publik Dra. Susanti, M.Si;
5. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril;
6. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pangkalpinang, Januari 2011

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	15
1. Implementasi.....	15
2. Pemberdayaan Sosial.....	25
3. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan.....	31
4. Kelompok Usaha Bersama.....	36
B. Kerangka Berpikir.....	37
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	38

<b>BAB III</b>	<b>METODELOGI PENELITIAN</b>	
	A. Lokasi Penelitian.....	42
	B. Desain Penelitian.....	42
	C. Populasi dan Sampel.....	45
	D. Instrumen Penelitian .....	46
	E. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
	F. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Kondisi Umum.....	53
	B. Kondisi Kelompok Usaha Bersama.....	54
	C. Karakteristik Informan Pelaksana Program.....	55
	D. Karakteristik Responden KUBE Produktif dan KUBE Non Produktif .....	57
	E. Implementasi Program.....	61
	F. Analisis Hasil Wawancara Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama .....	79
	G. Analisis Hasil Kuesioner Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama .....	85
	H. Hasil Analisis.....	89
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR GAMBAR****Halaman**

Gambar 1.1	Proses Pengusulan Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	6
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang.....	37
Gambar 4.3	KUBE Yang Telah Memperoleh Bantuan Di Kota Pangkalpinang.....	54

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Jumlah Keseluruhan Kelompok Usaha Bersama Di Kota Pangkalpinang Dari Tahun 2006 - 2010.....	54
Tabel 4.2	Komposisi Tingkat Umur, Tahun 2010.....	55
Tabel 4.3	Komposisi Jenis Kelamin, Tahun 2010.....	56
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Informan, Tahun 2010.....	57
Tabel 4.5	Komposisi Tingkat Umur Responden, Tahun 2010.....	58
Tabel 4.6	Komposisi Jenis Kelamin Responden, Tahun 2010.....	59
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Responden, Tahun 2010.....	60
Tabel 4.8	Jumlah Tenaga Pengelola Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2009/2010.....	70
Tabel 4.9	Ditinjau Dari Indikator Masukan ( <i>input</i> ).....	97
Tabel 4.10	Ditinjau Dari Proses ( <i>proces</i> ).....	97
Tabel 4.11	Ditinjau Dari Keluaran ( <i>output</i> ).....	98
Tabel 4.12	Ditinjau Dari Manfaat ( <i>outcomes</i> ).....	98

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Nama-Nama Informan Instansi/Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Lampiran 2 Daftar Nama Responden Kelompok Usaha Bersama Yang Produktif
- Lampiran 3 Daftar Nama Responden Kelompok Usaha Bersama Yang Tidak Produktif
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara Informan
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara Responden
- Lampiran 6 Kuesioner Responden
- Lampiran 7 Transkrip/ Ringkasan Hasil Wawancara
- Lampiran 8 Peta Lokasi Penelitian
- Lampiran 9 Foto-Foto/Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 Surat Izin Penelitian





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan hak dasar manusia sehingga harus menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan pihak partisipan lainnya. Pemerintah memandang perlu memberdayakan lembaga sosial lainnya agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan merupakan upaya penguatan pribadi, antar pribadi dan organisasi, sehingga yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan juga dapat dianggap sebagai rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. (Suharto, 2005).

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat mendasar dan perlu ditangani secara lintas sektoral, berkesinambungan, dan sinergis. Permasalahan ini menjadi prioritas dengan pertimbangan bahwa masalah

kemiskinan merupakan masalah pokok dari semua permasalahan kesejahteraan sosial yang juga menjadi penyebab timbulnya berbagai macam permasalahan sosial lainnya seperti pelacuran (tuna susila), gelandangan dan pengemis, kelaparan, keterasingan, keterbelakangan, ketelantaran, kriminalitas dan keresahan sosial lainnya (Depsos RI, 2008)

Namun demikian, harus diakui bahwa setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan taraf kesejahteraan sosial masyarakat mengingat sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang masalah sosial tidak dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan kesejahteraan sosial.

Implementasi kebijakan dan program pemerintah yang mengatasmakan pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah, umumnya masih merupakan adopsi dari struktur dan mekanisme program pusat pada masa sebelum era otonomi daerah diberlakukan. Ciri pelaksanaan program meliputi jangkauan pelayanan yang terbatas, masih kuat didasarkan pada petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang kaku, setiap tahap kegiatan didominasi oleh peran petugas pemerintah, dan orientasi keberhasilan program masih terbatas pada pencapaian target fisik atau administratif. Akibat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengelola program, seperti macetnya perguliran dana, penyalahgunaan kewenangan, bantuan tidak sampai pada sasaran, bantuan tidak



tepat sasaran dan tidak berkembangnya usaha ekonomi produktif penerima layanan karena tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Di era otonomi daerah, pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat miskin lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Implikasinya adalah bahwa kebijakan dan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin umumnya bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal atau regional menjadi strategis pada masa yang akan datang. Penilaian yang berdasarkan konsep *Human Development* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan masyarakat, sehingga masyarakat dan dunia usaha sebagai stakeholders dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan. J.Kristiadi (dalam Depsos RI, 2008) mengemukakan bahwa " pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan sosial bagi masyarakat secara merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat ". Penilaian terhadap proses analisis kebijakan sebagai suatu masalah kebijakan jika terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan. Disamping itu dikemukakan pula bahwa penilaian atau analisis kebijakan pada dasarnya adalah teknologi yang ditemukan umat manusia untuk menyelesaikan masalah bagaimana pengambil keputusan memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya benar-benar *excellent*. Pemberdayaan dinilai tepat menjadi salah satu pilihan kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini, karena *pertama*, gerakan partisipasi masyarakat semakin nyata melalui kelompok-kelompok; *kedua*, tuntutan kehidupan global yang menghendaki setiap pembangunan melibatkan masyarakat (Depsos RI, 2008).

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencantumkan kewajiban dan hak-hak dasar manusia dalam menikmati sistem jaminan dan perlindungan sosial serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada. Kebijakan nasional yang digulirkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat antara lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lain sebagainya. PNPM-Mandiri dengan *leading* sektor adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan PEMP dengan *leading* sektor adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan PKH dan KUBE sebagai *leading* sektornya adalah Departemen Sosial RI. PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM- Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM-Mandiri adalah :



- a) Tujuan Umum adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- b) Tujuan Khusus adalah:
- (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
  - (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
  - (3) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
  - (4) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
  - (5) Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
  - (6) Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
  - (7) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. (Sekretariat Tim-PNPM Mandiri, 2010).

Sedangkan program KUBE adalah program pemberdayaan masyarakat miskin yang digulirkan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan menggunakan pendekatan kelompok, dengan sasaran masyarakat miskin yang produktif. Pendekatan melalui KUBE ini merupakan identitas Departemen Sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi fokus kajian penulis dalam hal ini adalah program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE. Sementara PKH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan. Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan program pemberdayaan sosial Departemen Sosial RI Tahun 2009, pemberdayaan sosial masyarakat



miskin dilakukan melalui pendekatan KUBE dengan alasan, *pertama*, dengan sistem KUBE kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring serta pembinaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, tenaga dan waktu yang digunakan. *Kedua*, dengan pembinaan melalui KUBE diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan KUBE. *Ketiga*, diharapkan dengan KUBE dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, baik antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok. *Keempat*, KUBE dapat berfungsi menggerakkan keswadayaan, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, wadah pembinaan sosial, ekonomi dan budaya

Implementasi program dilaksanakan secara berjenjang yang melibatkan dinas teknis yaitu Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksana di lapangan. Proses pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Pengusulan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Depsos RI, 2009

Pelaksanaan program KUBE sebagai salah satu instrumen dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang memang sudah berjalan sejak tahun 1980-an. KUBE ini merupakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan program kesejahteraan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka (Depsos RI, 2008). Ada beberapa hal yang signifikan dari KUBE dalam program pemberdayaan sosial masyarakat miskin bukan semata-mata untuk perubahan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga untuk perubahan kehidupan sosialnya. Sebagai contoh, dengan KUBE banyak orang yang mengungkapkan persoalan anggota KUBE di depan orang banyak, orang yang biasanya malu, tapi kalau sudah terbiasa dengan kelompok, akhirnya mereka saling percaya sehingga saling mengungkapkan diri bahkan anggota KUBE juga dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Program KUBE merupakan komitmen nasional yang harus dilaksanakan dengan baik dan harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggungjawab sosial bersama serta dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin.

Berkaitan dengan program KUBE ada beberapa prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu : 1) Prinsip pendekatan kelompok, dimana kelompok ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan anggota, bukan



untuk kepentingan petugas atau instansi pembina. 2) Prinsip keserasian, anggota KUBE harus saling mengenal, saling percaya, dan mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. 3) Prinsip kepemimpinan dari mereka sendiri, yaitu memberikan kesempatan kepada KUBE untuk mengembangkan kepemimpinan dari mereka sendiri. 4) Prinsip pendekatan kemitraan, dimana pendamping menempatkan KUBE sebagai mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengambilan keputusan. 5) Prinsip swadaya, kegiatan pendampingan diharapkan mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian anggota KUBE. 6) Prinsip belajar sambil bekerja, dimana aktivitas KUBE didampingi untuk melakukan sendiri, mengalami sendiri dan menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi dalam kelompok. 7) Prinsip kekeluargaan, dimana prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE dibangun atas semangat kekeluargaan dimana sesama anggota KUBE dan lingkungannya, pendampingan tidak hanya ditujukan kepada kepala keluarga, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga untuk memberikan motivasi.

Keluarga atau masyarakat yang tergabung dalam KUBE dapat juga terlibat dalam PNPM-Mandiri, karena kedua program ini sama-sama saling mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Dimensi sosial-ekonomi merupakan pilar inti dari kegiatan KUBE. Secara sosial upaya penggabungan masyarakat miskin dalam kelompok usaha bersama memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. KUBE mampu menjadi media yang meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara imbal balik, sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat

kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, aktivitas usaha yang dilakukan dalam kelompok memberi kekuatan untuk mengembangkan usaha, menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring usaha, membuka peluang mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi yang demokratis.

Program KUBE dalam konteks pembangunan sosial, merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial. Tujuan sosial dalam hal ini adalah memecahkan masalah sosial yang mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan terhadap suatu kondisi yang tidak diharapkan, yaitu masalah kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial yang menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (Depsos, 2009).

Bank Dunia memakai ukuran kemiskinan dengan batas pendapatan US \$ 2 perhari. Badan Pusat Statistik menggunakan garis kemiskinan makanan yaitu setara dengan pemenuhan 2100 kalori perhari. Orang miskin tidak saja kelaparan, tetapi juga buta huruf (miskin akses pendidikan), sakit-sakitan (miskin akses kesehatan), perumahan yang tidak layak, pakaian compang-camping dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menempatkan masalah kemiskinan sebagai masalah utama yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin, yang ada sekarang masih lemah dan belum dikaitkan dengan persoalan hak azasi manusia, begitu juga dengan peraturan daerah/perda belum ada menyentuh persoalan dasar masyarakat miskin, masing-masing



instansi terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga koordinasi yang seharusnya menjadi penuntun penanggulangan kemiskinan daerah malah berjalan ditempat. Perlunya perbaikan kebijakan tata kelola program yang selanjutnya akan memberikan pengaruh penguatan dalam perbaikan kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin di Bangka Belitung sebanyak 235.083 jiwa. Sementara jumlah penduduk Bangka Belitung sebanyak 1.074.775 jiwa (hasil sensus tahun 2005). Berdasarkan data hasil pendataan Sosial Ekonomi penduduk 2005 (PSE05) yang dikenal dengan Sensus Kemiskinan 2005, jumlah keluarga miskin sebagai rumah tangga miskin (RTS) yang menerima program pemberdayaan dari tahun 2002-2009 sebanyak 19.425 KK dari keseluruhan rumah tangga yang berjumlah 247.256 RTS . Pada waktu pendataan BPS tahun 2005 ada tambahan sebanyak 12.173 KK, hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan harga BBM khususnya bensin. Jika benar data tersebut dan umpamanya jumlah anggota keluarga rata-rata 4 jiwa maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 134.500 KK. Sementara itu berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2008 jumlah keluarga miskin di Kota Pangkalpinang sebanyak 3.889 RTS. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jumlah penduduk miskin Bangka Belitung dari kondisi awal tahun 2006 sebanyak 137.132 KK. Berarti ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 97.951 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk miskin dan

kelompok sejahtera, jumlah KK yang termasuk dalam kelompok prasejahtera mencapai 28.563 KK atau 11,80% dari seluruh KK yang ada (BPS, Bangka Belitung dalam angka, 2008).

Penyaluran bantuan Program pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin melalui KUBE dilakukan melalui dua tahap, yaitu *tahap pertama*, bantuan stimulan diberikan kepada KUBE masyarakat miskin yang baru tumbuh atau KUBE penumbuhan yang diberikan dalam bentuk bantuan alat-alat atau sarana produksi, *tahap kedua* yaitu bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin melalui KUBE pengembangan atau Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dalam bentuk uang tunai yang langsung disalurkan kerekening masing-masing KUBE dengan syarat KUBE tersebut produktif atau berkembang. Proses pendataan dilakukan oleh petugas pendamping kabupaten/kota dan Ketua RT masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Sebelum melakukan pendataan lapangan, setiap petugas telah dilatih dan dibekali melalui pemantapan petugas pendamping sosial masyarakat miskin. Berdasarkan pelatihan tersebut, setiap petugas telah mengetahui konsep, definisi dan kriteria sasaran. Sementara data keluarga miskin dari BPS digunakan sebagai rujukan untuk memverifikasi data keluarga miskin yang telah ada.

Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah KUBE yang ada di Kota Pangkalpinang dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sebanyak 270 kelompok. Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara administratif Kota Pangkalpinang terdiri dari lima



Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan, dan Kecamatan Taman sari. KUBE yang aktif dan berkembang tersebut tersebar di lima kecamatan, dimana Kecamatan Pangkal Balam sebanyak 30 KUBE, Kecamatan Gerunggang 25 KUBE, Kecamatan Rangkui 15 KUBE, Kecamatan Bukit Intan 20 KUBE dan Kecamatan Taman Sari sebanyak 10 KUBE. Sementara itu sebanyak 170 KUBE tidak aktif atau sudah tidak produktif, membubarkan kelompok, bergabung atau *merger* dengan kelompok lain dan membentuk kelompok baru dengan anggota baru.

#### **B. Perumusan Masalah**

Tujuan dari program pemberdayaan sosial melalui KUBE diarahkan dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan yaitu; *Pertama*, peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok. *Kedua*, peningkatan pendapatan. *Ketiga*, pengembangan usaha *Keempat*, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar serta meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. Adapun sasaran dari KUBE meliputi keluarga miskin atau fakir miskin yang mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 1981, dimana disebutkan bahwa fakir miskin atau keluarga miskin adalah seseorang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau seseorang atau keluarga yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dasarnya.

Dipilihnya Kota Pangkalpinang sebagai lokus penelitian dikarenakan Kota Pangkalpinang disamping sebagai Ibukota Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat juga banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan bersaing dengan KUBE-KUBE binaan Departemen Sosial RI.

Dengan melihat dan mencermati berbagai fenomena permasalahan pemberdayaan sosial masyarakat miskin di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terhadap implementasi program pemberdayaan sosial masyarakat miskin. Topik bahasan yang ingin peneliti kaji adalah *“Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang”*.

Agar fokus dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis merumuskan masalah pada fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat atau hasil dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE di Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan program tersebut ? dan
3. Apakah program tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. mengetahui manfaat atau hasil dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE yang telah dilaksanakan.
2. mengetahui tingkat keberhasilan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE di Kota Pangkalpinang

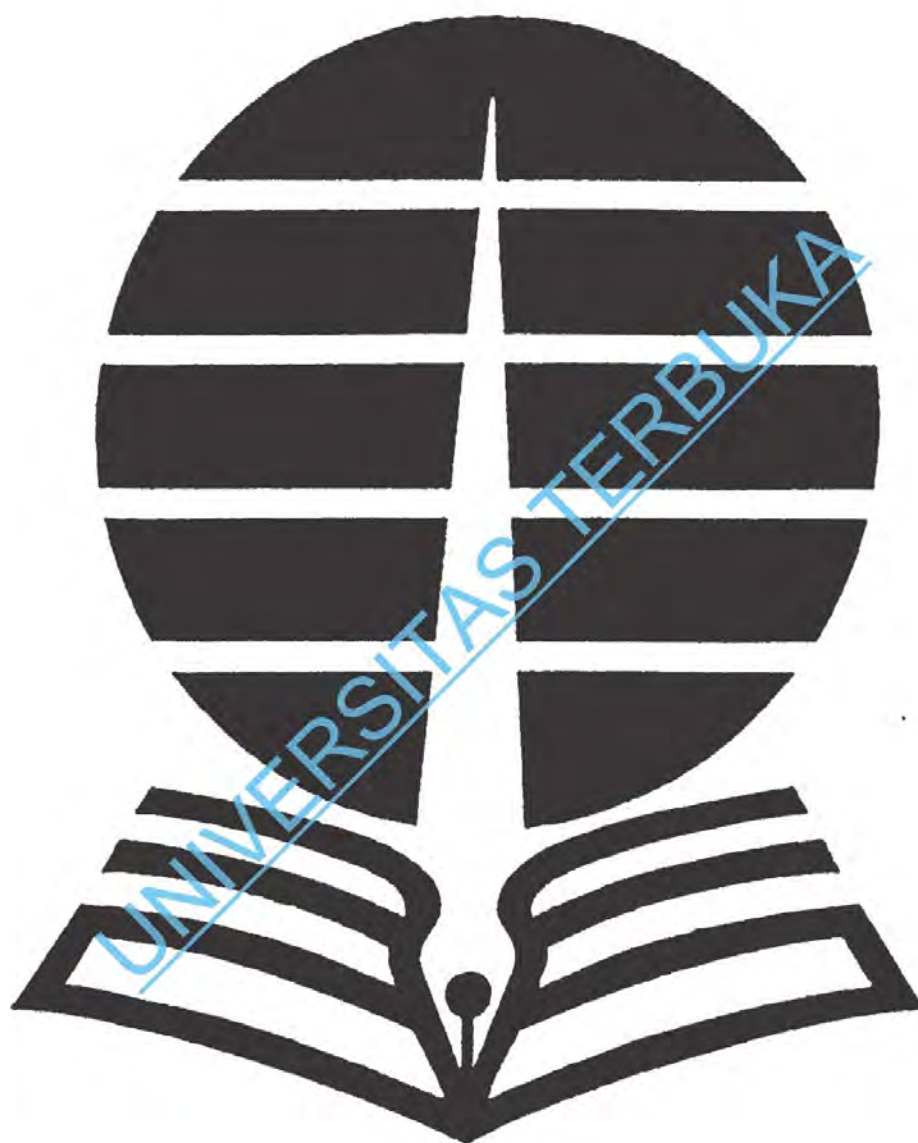


3. mengetahui efektivitas program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Departemen Sosial RI dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merumuskan kebijakan dan program baru atau memperbaiki kebijakan dan program yang sudah ada dalam rangka mengatasi kemiskinan daerah;
2. bahan masukan bagi aparat pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengevaluasi program kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik; dan
3. bahan untuk menambah pengetahuan terutama dalam bidang kebijakan publik dan referensi bagi penelitian berikutnya serta mengembangkan wawasan dalam bidang penelitian yang sesuai dengan bidang kajian dan program yang sedang peneliti tekuni.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Implementasi

Evaluasi implementasi adalah penting untuk diketahui pada tingkatan mana suatu program efektif setelah diterapkan secara penuh. Evaluasi implementasi menjelaskan bagi para pengambil keputusan tentang apa yang terjadi dalam program dan bagaimana program telah berkembang. Pembahasan terhadap implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) sesungguhnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*). Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugroho, 2009: 505) menyebutkan bahwa:

*"Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued, and, in a variety of way, structures the implementation process"*.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Tujuan



dari implementasi adalah mengkaji tingkat kepatuhan (*compliance*) yakni memberikan informasi mengenai bagaimana suatu kebijakan dijalankan di lapangan, menemukan konsekuensi kebijakan yakni melihat berbagai dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan, menemukan berbagai bentuk kendala pelaksanaan kebijakan, baik pada aspek kelembagaan, personil, prosedur, sosial dan sebagainya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan yang ada, yaitu; langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Edwards III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah “ *lack of attention to implementation; without effective implementation, the decision of policymakers will not be carried out successfully.* Edwards menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat faktor tersebut adalah : komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resource*), kecenderungan-kecenderungan (*disposition*) atau tingkah laku-tingkah laku (*attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Komunikasi (*communication*) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut,

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2009).

Lebih lanjut Edwards mengatakan bahwa persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas staf, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Hal yang lebih penting juga adalah kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan. Interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin mempersulit implementasi yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awal.

Oleh sebab itu sikap baik para pelaksana terhadap suatu kebijakan tertentu yang berarti adanya dukungan dari para pelaksana maka besar kemungkinan implementasi kebijakan akan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sedangkan badan pelaksana kebijakan adalah birokrasi, baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi



untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern (Winarno, 2007)

Menurut Jones (dalam Silalahi, 1992: 150) dalam implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: (1). Beberapa orang di luar birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi, seperti legislator, hakim dan lain-lain, (2). Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi (Waluyo, 2007). Implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Isilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, mencakup tindakan-tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Proses implementasi adalah proses pelaksanaan untuk menghasilkan *output* kegiatan guna mewujudkan tujuan kebijakan, proses perubahan keputusan dari tataran ide menjadi tindakan kolektif dan konkret, proses pengendalian administrasi meliputi pelibatan inter-organisasi, koordinasi, pengerahan SDM, alokasi anggaran dsb. Isu implementasi antara lain mengapa sebuah kebijakan/program yang telah



direncanakan seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, mengapa para pelaksana tidak dapat memanfaatkan sumber daya (SDM, *financial*, peralatan) yang tersedia secara optimal, mengapa unit/bagian pelaksana kebijakan tidak mampu mengembangkan kolaborasi dan koordinasi.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn memberikan batasan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (winarno, 2007). Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tersebut tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan meskipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*).

Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b) Sumber-sumber kebijakan
- c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d) Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana
- e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f) Kecendrungan para pelaksana (*implementors*)

Dilihat dari sudut pengertian-pengertian tersebut, maka lebih jauh dikatakan bahwa implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. *Kedua*, badan-badan pelaksana

mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerjanya. Suatu program/kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia (Winarno, 2007)

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa teori implementasi yang sejalan dengan penelitian penulis ini adalah teori implementasi yang dikembangkan oleh Edwards III, meskipun dari keempat variabel tersebut terdapat kemiripan dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, akan tetapi dalam memberikan penjelasannya tidak sama.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang



diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya Edwads menjelaskan bahwa keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus (Winarno, 2007).

Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997).

Selain dipengaruhi oleh konteks makro kondisi ekonomi, sosial dan politik, Howlett dan Ramesh (1995) mencatat bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan, keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukuran kelompok-kelompok sasaran dan



perubahan perilaku yang diharapkan. Van Meter dan Van Horn menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
- d) Vitalitas suatu organisasi.
- e) Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan (Winarno, 2007)

Bridgeman dan Davis (2004), prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a) Didasari teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi jika disusun kerangka konseptual yang sederhana, jelas dan teruji secara ilmiah, maka implementasi kebijakan kemungkinan besar akan berhasil
- b) Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks, semakin banyak dan kompleks langkah-langkah sebuah kebijakan, semakin besar kesulitan yang dihadapi kebijakan akibat banyaknya kesalahpahaman dan pertentangan yang timbul.
- c) Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas
- d) Pihak yang bertanggungjawab memberikan pelayanan harus dilibatkan dalam perumusan desain. Para birokrat ditingkat pelaksana sebaiknya memiliki informasi yang lengkap mengenai hakekat, model serta landasan filosofis mengenai kebijakan yang mendasari diberikannya sebuah program.
- e) Melibatkan monitoring dan evaluasi secara teratur. Pengawasan evaluasi sangat diperlukan agar implementasi berjalan efektif.
- f) Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh hingga kebijakan tersebut telah mampu diterapkan melalui serangkaian program, yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan dapat juga digagalkan oleh beberapa faktor penghambat. Aspek-aspek ini biasa disebut sebagai jebakan implementasi

kebijakan (*implementation trap of policy*). Agar implementasi berjalan disarankan agar menghindari jebakan sebagai berikut :

- a) Spesifikasi yang tidak lengkap. Kebijakan yang tidak memiliki atribut dan instrumen yang lengkap akan menuai kegagalan dalam pengimplementasi
- b) Lembaga yang tidak tepat. Kebijakan yang baik belum tentu berjalan baik jika dilaksanakan oleh lembaga yang tidak tepat.
- c). Konflik tujuan. Kebijakan kadang memiliki tujuan yang berlawanan
- d) Kegagalan insentif. Kebijakan tanpa insentif seringkali diabaikan.
- e) Konflik petunjuk. Instruksi yang tidak jelas dan berlawanan satu sama lain dapat membingungkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah program.
- f) Kurang kompetensi. Pelaksana perlu kompeten dengan jenis program yang diterapkan.
- g) Sumberdaya tidak memadai.
- h) Kegagalan komunikasi. Banyak kebijakan tergantung pada adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga pelaksana komunikasi dengan para penerima layanan (Wahab, 1997).

Hogwood dan Gunn (dalam Hill, 1993) menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan kondisi atau persyaratan sebagai berikut : 1) kondisi eksternal gangguan/kendala yang serius, 2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai, 3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, 4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, 5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, 6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8) tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, 9) komunikasi dari koordinasi yang sempurna, 10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna (Wahab, 1997)



Menurut Katz (dalam Abidin, 2006:45-46) faktor-faktor pendukung kebijakan dalam dunia usaha biasa disebut masukan atau *inputs*, dan dalam manajemen perusahaan biasa disebut dengan 6 M : *men, money, material, machine, method, and market*. Dilihat dari sisi manajemen publik istilah 6 M kurang cocok sebagai faktor pendukung (*supporting factors*) mestinya adalah *human resources, finance, logistic, information, participation, and legitimation*. Untuk *men* melalui jenjang kepangkatan dan karier *human resources* bukan *outsourcing*. *Money* melalui persetujuan DPR sebagai anggaran atau *budget*. *Machine* adalah informasi, tanpa informasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa mendapat persetujuan dari atasan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada tidak boleh ada suatu kegiatan dalam pemerintahan. Suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang di atasnya. Penafsiran yang terlalu luas dari ketentuan ini mengakibatkan administrasi pemerintahan atau birokrasi menjadi kaku. *Input* dalam manajemen publik adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan pokok evaluasi adalah untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik (Nugroho, 2009).

Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi



perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut : a) Indikator masukan (*input indicators*); bahan-bahan dan sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. b) Indikator proses (*process indicators*); cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumber daya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan. c) Indikator keluaran (*output indicators*); barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program. d) Indikator dampak (*outcome indicators*); hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program (Suharto, 2007).

Selanjutnya evaluasi juga sangat bermanfaat bagi para analis dan pembuat kebijakan, karena dapat membantu mereka dalam:

- 1) Menentukan keberlanjutan dan prioritas program berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, termasuk perubahan-perubahan ekonomi, sosial dan politik pada tataran makro.
- 2) Menguji apakah hasil-hasil atau dampak (*outcomes*) yang ditimbulkan suatu program sesuai dengan tujuan-tujuan (*objectives*) yang telah dinyatakan.
- 3) Menjelaskan apakah ada cara lain yang lebih baik dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan.
- 4) Mengidentifikasi model-model program baru atau perluasan program-program yang ada yang dipandang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- 5) Memutuskan apakah sumberdaya yang digunakan untuk sebuah program harus dihentikan, dilanjutkan atau ditingkatkan (Suharto, 2007)

## **2. Pemberdayaan Sosial**

Menurut Parsons (1994) pemberdayaan adalah ” sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai

*pengontrolan atas dan kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.*" Sedangkan menurut Rappaport (1984) pemberdayaan adalah " *suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berdaulat atas kehidupannya*" (Suharto, 2005). Lebih jauh Torre (1985 dalam Parson (1994:106) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah :

*"A process through which people become strong enough to participate within, share in the control of, and influence events and institutions affecting their lives, (and that in part) empowerment necessitates that people gain particular skills, knowledge and sufficient power to influence their lives and the lives those they care about."*

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta



berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Sekretariat Tim Pengendali PNPM-Mandiri, 2010).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "kelarusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, Mc Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Suharto, 2005). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasi.

Konsep pemberdayaan kemunculannya di dasari oleh gagasan yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Payne (dalam Adi, 2001:32), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah membantu klien



memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Berdasarkan pandangan Payne tersebut, terdapat pemahaman bahwa pemberdayaan merupakan proses pertolongan kepada klien agar mempunyai kemampuan untuk pengambilan keputusan dan pilihan-pilihan yang selaras dengan kehidupannya. Hasenfeld (dalam Dubois dan Miley, 1992:227) memberikan batasan pemberdayaan sebagai berikut :

*"Empowerment is a process through which client obtain resources, personal, organizational, community - then enable them to gain greater control over their environment and to obtain their aspirations"*

Pemberdayaan adalah suatu proses melalui mana klien mencapai sumber-personal, organisasi, komunitas yang memungkinkan mereka memperoleh pengendalian yang lebih besar atas lingkungan mereka dan mencapai aspirasi-aspirasi mereka. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan peluang bagi klien untuk dapat mengungkapkan aspirasi mereka, memperoleh sumber baik individu, organisasi, maupun komunitas (Adi, 2001). Ife (1995:182) menjelaskan bahwa

*"empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community."*

Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk

meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.

Ife (1995:183) mengemukakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk membawa masyarakat yang tidak beruntung kepada masyarakat yang lebih adil dan akan memperkuat anggota komunitas lokal sebagai komunitas serta berupaya mewujudkan komunitas dengan berbasis struktur yang efektif.

Pemberdayaan dilaksanakan dengan bertolak dari situasi ketidakberdayaan yang dialami oleh klien baik secara perseorangan, kelompok maupun komunitas. Ketidakberdayaan sebagaimana dikemukakan Keiffer dan Torre (dalam Suharto, 1997:1-34) pada umumnya dialami oleh kelompok masyarakat karena kondisi fisik maupun faktor-faktor tertentu sehingga mereka terpaksa tidak berkemampuan dan berkesempatan untuk menentukan apa yang ada pada dirinya. Ife membagi kelompok-kelompok yang tidak berdaya / beruntung kedalam tiga kelompok sebagai berikut :

- 1) Kelompok lemah secara struktur (*primary structural disadvantaged groups*), yaitu mereka yang tidak beruntung akibat tekanan-tekanan struktural terutama terkait dengan kelas; gender dan etnis yang meliputi orang miskin, penganggur, wanita, masyarakat lokal dan kelompok minoritas.
- 2) Kelompok lemah khusus (*other disadvantaged groups*), yaitu manula, anak dan remaja, penyandang cacat (fisik, mental), gay, lesbian, suku terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal (*the personally disadvantaged*), menjadi tidak beruntung, sebagai hasil dari siklus personal yang meliputi mereka yang mengalami masalah pribadi, keluarga, dan kesedihan krisis identitas.



Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). Setiap upaya penanganan masalah melalui strategi pemberdayaan pada prinsipnya membangun kekuatan dan kemampuan orang yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Bagaimana pengambil keputusan dalam menempatkan program dan anggaran bagi orang-orang lemah sehingga mampu menciptakan keseimbangan pada struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Secara operasional agar fokus dan tujuan pemberdayaan dalam penelitian ini dapat diketahui, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau sekelompok itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan (Suharto, 2005). Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, penulis menggunakan pendapat atau teori Hasenfeld yang sesuai dengan bidang kajian dalam penelitian ini. Menurut Hasenfeld ada tiga ciri atau indikator pemberdayaan, yaitu 1) Terjangkaunya sumber-sumber produktif yang memudahkan bagi mereka dapat meningkatkan pendapatannya. 2) Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka baik secara individu, kelompok maupun komunitas



mereka. 3) Terdapatnya pengendalian yang lebih besar atas lingkungan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, *pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya*. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk : *Pertama*; memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. *Kedua*; meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial tersebut dapat dilakukan melalui : a) Peningkatan kemauan dan kemampuan b) Pengalihan potensi dan sumber daya. c) Penggalian nilai-nilai dasar. d) Pemberian akses. e) Pemberian bantuan usaha.

### 3. Kemiskinan dan Indikator Garis Kemiskinan

Menurut Soekanto (2006:320) kemiskinan diartikan

*"sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut"*.

Kemiskinan pada dasarnya berkisar pada kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti; pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Oleh karena itu masalah kemiskinan dapat memunculkan berbagai dimensi seperti; keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan kemampuan mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Kemiskinan juga merupakan faktor pendukung munculnya berbagai masalah

sosial lainnya seperti; pelacuran (tuna susila), gelandangan dan pengemis, kelaparan, kriminalitas dan keresahan sosial lainnya (Suharto, 2004).

Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan (Sahdan, 2008)

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan, dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective* (Sahdan, 2008)



Definisi kemiskinan menurut BPS dan Depsos (2002:3) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dinyatakan bahwa *kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.*

Selanjutnya Departemen Sosial RI memberikan indikator atau kriteria penerima program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui KUBE sebagai berikut: a) Penghasilan rendah, atau berada dibawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per-orang per-bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota. b) Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial). c) Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki satu set pakaian lengkap per-orang per-tahun). d) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. e) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anak-anaknya. f) Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin. g) Tinggal di rumah yang tidak layak huni. h) Sulit memperoleh air bersih.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan ini secara subyektif dan komparatif. Sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa sebenarnya yang



termasuk orang miskin tersebut dan dimana si miskin itu berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan (Wikipedia Indonesia, 2004).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik secara sosial maupun ekonomi. Ada beberapa indikator atau metode yang digunakan dalam mengukur garis kemiskinan. Menurut Santoso (dalam Alqadrie, 1993:3) indikator garis kemiskinan adalah: *"besarnya jumlah uang yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang terdiri dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi"*

Selanjutnya menurut Suharto (2007) berdasarkan garis kemiskinan, orang miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah minimum kebutuhan hidup, yakni sejumlah asupan kalori yang diperlukan setiap orang untuk mampu bertahan hidup (misalnya 2.100 kalori perhari) yang kemudian dikonversikan kedalam sejumlah uang. BKKBN memberikan indikator tingkat kemiskinan dengan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu keluarga prasejahtera, dimana keluarga tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara minim, seperti pendidikan, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi, yaitu:

- 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);

- 2) tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
- 3) tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
- 4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal;
- 5) rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sumber alam;
- 6) tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat;
- 7) tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- 9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpendek) (Suharto, dkk, 2004:7-8).

Sementara itu Bank Dunia memakai indikator kemiskinan dengan batas pendapatan US \$ 2 perhari. Sedangkan Badan Pusat Statistik menggunakan indikator garis kemiskinan dengan makanan, yaitu setara dengan pemenuhan 2100 kalori perhari. Sedangkan Sayogyo (1978) menentukan indikator kemiskinan adalah sebagai berikut: *kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi 320 kg beras per tahun atau perhitungan kebutuhan gizi dan pangan.*

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan suatu keluarga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum sandan dan pangan.
- 2) Penghasilan atau upah minimum yang diterima setiap bulannya.
- 3) Ada tidaknya tabungan atau cadangan berupa uang dan barang (Suharto, 2007)

Sementara itu merujuk pada pedoman umum program pemberdayaan fakir miskin, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, indikator kemiskinan yang menjadi sumber data program pemberdayaan sosial



masyarakat miskin mengacu pada kriteria rumah tangga sasaran yang diterbitkan oleh BPS yang meliputi sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per-orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/ 2 (dua) kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/ perbulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga ; tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki abungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, seperti ; sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

#### 4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari Kepala Keluarga-Kepala Keluarga fakir miskin. KUBE menurut Sumodiningrat (2009:88) adalah

*” kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya”.*



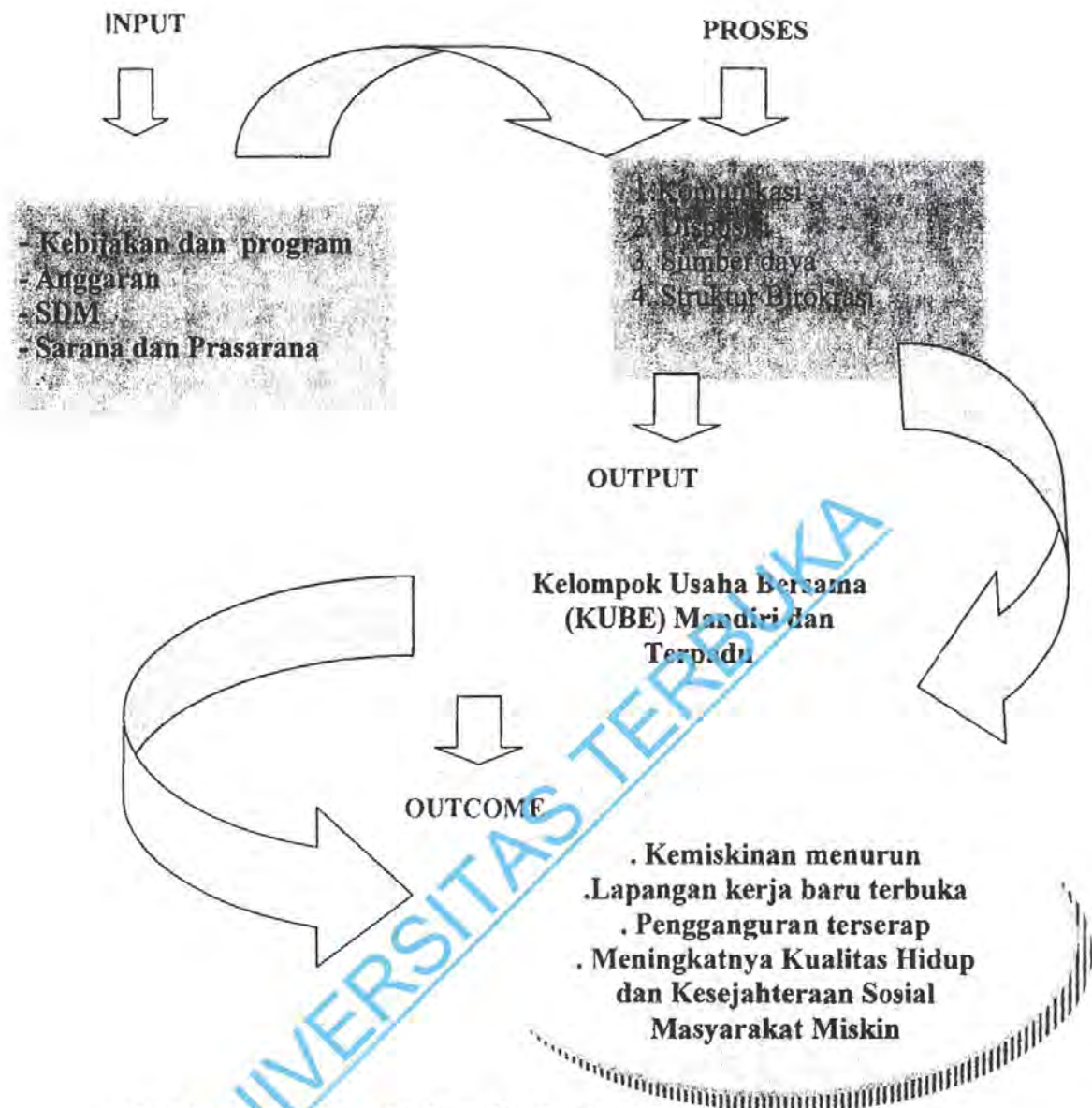
KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Departemen Sosial R.I (2008)

*” KUBE adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah usaha bersama .”*

Selanjutnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Departemen Sosial RI (2009) mengaris bawahi bahwa KUBE adalah kelompok warga masyarakat miskin yang terdiri dari 5 - 10 KK atau lebih untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial yang hidup dalam kebersamaan, kegotong-royongan dan saling tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial para anggotanya.

## **B. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan uraian dan beberapa teori tersebut penulis menggunakan satu model teori dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut agar tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu penulis menggunakan model Edwar III, dan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Pangkalpinang**

### C. Definisi Konsep dan Operasional.

Adapun konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi program tersebut.

2. Konsep Pemberdayaan Sosial. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Konsep Kelompok Usaha Bersama. KUBE adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah usaha bersama.
4. Konsep Kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Sedangkan operasionalisasi konsep adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL	TARGET
1	IMPLEMENTASI a. Komunikasi - Bahan .Juklak .Juknis - Sarana/Media - Sasaran - Persyaratan dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisi</li> <li>• Kejelasan</li> <li>• Konsisten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Fisik</li> <li>- Sasaran Waktu</li> </ul>



NO	INDIKATOR	VARIABEL	TARGET
	b. Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggungjawab</li> <li>• Sikap</li> <li>• Kepatuhan</li> <li>• Pemilihan personel</li> <li>• Insentif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung/ Menerima</li> <li>• Menolak</li> <li>• Dedikasi</li> </ul>
	c. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf</li> <li>• Fasilitas</li> <li>• Wewenang</li> <li>• Kompetensi / Keahlian</li> <li>• Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas</li> <li>• Kuantitas</li> <li>• Kesesuaian/eseloning</li> <li>• Juklak/Juknis /Perda/Pergub</li> </ul>
	d. Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan (Fragmentasi)</li> <li>• Koordinasi Lintas Lembaga/Instansi</li> <li>• SOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektif</li> <li>• Berjalan dengan baik sesuai rencana</li> </ul>
2	<b>PEMBERDAYAAN</b> a. Kemampuan mencapai sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka b. Kemampuan menyampaikan aspirasi baik secara personal, kelompok/komunitas c. Kemampuan mengendalikan terhadap lingkungan yang lebih besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses ekonomi</li> <li>• Potensi lokal</li> <li>• Jaminan ekonomi</li> <li>• Partisipasi dalam kelompok</li> <li>• Jaringan Kerja</li> <li>• Kesadaran dan kepercayaan diri</li> <li>• Kebersamaan</li> <li>• Keadilan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ekonomi anggota kelompok</li> <li>• Proses Pembentukan Kelompok/Interaksi Sosial</li> <li>• Keterlibatan Anggota dalam Kelompok</li> <li>• Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok</li> <li>• Bimbingan teknis dan keterampilan berusaha</li> <li>• Pembinaan Kelompok</li> <li>• Pendampingan Sosial</li> </ul>
3	<b>KELOMPOK USAHA BERSAMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kumpulan atau kelompok keluarga miskin</li> <li>• Usaha Ekonomi Produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersamaan dalam kelompok</li> <li>• Usaha kelompok 5 s/d 10 orang</li> <li>• Usia produktif</li> <li>• Meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok</li> <li>• Memberi kekuatan untuk</li> </ul>

NO	INDIKATOR	VARIABEL	TARGET
			mengembangkan usaha • Menghimpun kekuatan modal
4	KEMISKINAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN	• Kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia	• Tidak punya sumber pencharian tetap • Punya sumber pencharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok • Sumber dan tingkat pendapatan (pokok/tambahan

UNIVERSITAS TERBUKA





### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kota Pangkalpinang dengan pertimbangan:

- 1) Merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Terdapat banyak Kelompok Usaha Bersama.
- 3) Terdapat banyak usaha-usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan bersaing dengan KUBE-KUBE binaan Depsos.
- 4) Belum ada penelitian yang serupa dengan yang penulis lakukan.

##### **B. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian. Struktur adalah kerangka, pengaturan, atau konfigurasi unsur-unsur struktur yang berhubungan dengan cara-cara yang jelas serta tertentu (Silalahi, 2009). Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Metode juga dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Metode penelitian dalam arti luas merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 2009). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi implementasi program

pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dengan studi di Kota Pangkalpinang adalah menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program serta mempertimbangkan proses dan tehnik yang telah digunakan untuk melakukan penilaian. Penelitian evaluasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data secara sistematis yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam yang sudah dicontohkan (Arikunto, 2007). Evaluasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan program, mengenai keberhasilan, kemitraan dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan sampai dengan perluasan jaringan kemitraan usaha.

Evaluasi terhadap program dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlibat dalam program ataupun orang-orang luar. Jika pelaku berasal dari dalam program disebut sebagai *evaluator internal*, sedangkan kalau pelaku berasal dari luar program disebut sebagai *evaluator eksternal*. Baik evaluator internal maupun eksternal masing-masing mempunyai kebaikan maupun kelemahan.

Evaluator internal, kebaikan adalah memahami seluk beluk program yang akan dievaluasi, sehingga pelaksanaan evaluasi akan dapat menyeluruh secara cermat. Dalam proses evaluasi apabila menjumpai hal-hal yang tidak pada tempatnya seketika dapat memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung, sehingga umpan balik dari evaluasi dapat segera



dimanfaatkan. Sedangkan kelemahan adalah oleh karena personal evaluator juga pelaksana program, unsur-unsur subjektivitas dapat dengan leluasa menyusup ke dalam diri penilai.

Evaluator eksternal, kebbaikannya adalah pelaku evaluasi akan bertindak dengan hati-hati, cermat, berpijak pada desain penilaian yang disusun terlebih dahulu. Walaupun di dalam perjalanan penilai evaluator menjumpai hal-hal yang menurut pertimbangannya kurang baik bagi program, namun informasi yang di peroleh tidak akan seketika disampaikan kepada penanggungjawab program atau pelaksana yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah apabila di dalam perjalanan kegiatan program ternyata ada ketidakterbacaan, sedangkan jika kegiatan diteruskan akan berakibatkan kerugian. Umpan balik yang diperoleh dari evaluator tidak dapat segera dapat dimanfaatkan (Arikunto, 2007)

Penelitian evaluasi, terutama pada tingkat program lokal, sebagian besar tidak bersifat teoritis baik dalam konsep maupun dalam pelaporan temuan. Walaupun penelitian evaluasi sama sekali tidak bersifat teoritis, namun bisa bersifat teoritis dalam pengertian ilmiah dimana biasanya bersifat deduktif dan sistem logikanya disusun dalam model hubungan sebab diantara variabel yang umum. Dengan cara bertentangan dengan logika, penyusunan deduktif dengan pendekatan teori *grounded* dalam penelitian evaluasi adalah induktif, pragmatis, dan sepenuhnya nyata. Tugas evaluator adalah membangkitkan teori program dari data holistik yang dikumpulkan melalui penyelidikan naturalistik untuk tujuan menolong staf program dan pembuatan keputusan guna memahami bagaimana fungsi program, mengapa berfungsi seperti itu, dan bagaimana dampak atau hasil dari program mengalir dari kegiatan program. (Patton, 2006)



### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yaitu apakah merupakan individu, kelompok, organisasi, dsb. Menurut Nawawi (2004) Populasi adalah: "*keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian*". Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pelaksana dan pengelola program dan seluruh KUBE yang ada di Kota Pangkalpinang sebanyak 270 Kelompok. Sehingga unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Usaha Bersama. Unit analisis dalam hal ini tidak secara otomatis dapat menjadi responden dalam penelitian, sehingga diperlukan adanya responden yang dianggap mewakili responden dan instansi tersebut.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Menurut Sudjana, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Nawawi, 2004). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 kelompok, dimana 50 kelompok tersebut adalah kelompok yang masih aktif dan berkembang sedangkan kelompok yang sudah tidak aktif lagi, penulis mengambil sampel tertentu yakni 5 orang mantan ketua atau pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE non potensial). Sedangkan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan informan kunci yaitu : 1) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai pengelola program atau kuasa pengguna

anggaran, 2) Kepala Bidang Pemberdayaan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat pembuatan komitmen. 3) Kepala Seksi pemberdayaan fakir miskin selaku pengelola kegiatan atau penanggungjawab kegiatan 4) Kepala Seksi Perencanaan Program selaku perencana program 5) Kepala Seksi monitoring dan Evaluasi dan 6) 3 (tiga) orang staf seksi pemberdayaan fakir miskin. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang benar-benar mewakili populasi. Umumnya sampel yang lebih besar lebih baik sebab sampel besar cenderung memiliki sedikit kekeliruan (Silalahi, 2009).

## 2. Teknik Sampling

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dan mewakili populasi secara keseluruhan, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara probabilitas (*probability sampling*). Dengan teknik random sampling, setiap subjek dalam populasi harus memiliki peluang yang sama besarnya sudah ditentukan untuk dipilih menjadi sampel. Teknik random sampling yang dilakukan dengan cara sampling daerah atau sampling wilayah (*areal sampling*) yakni pengambilan anggota sampel dengan mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-daerah geografis yang ada (Arikunto, 2007)

## D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner yang memuat berbagai pertanyaan substansi yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk melengkapi data yang dijangkau melalui kuesioner, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara atau interviu (*interview*) yang mendalam dan telaah dokumen (*documentation*).



## E. Prosedur Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yang mengetahui langsung tentang implementasi program ini dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara serta observasi lapangan.
- b. Data Sekunder adalah yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, arsip-arsip dan dokumentasi yang resmi serta dari instansi-instansi yang terkait. Fokus penelitiannya adalah pandangan pejabat pengelola program, pelaksana program, pejabat struktural terkait dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha bersama, baik aktif maupun non aktif.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data proses penelitian kualitatif ada tiga kegiatan, yaitu : proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), dan tahap pengumpulan data (*logging the data*). Pada tahap memasuki lokasi penelitian (*getting in*), peneliti menunjukkan surat izin resmi sebagai bukti peneliti bahwa akan mengadakan suatu penelitian di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti berusaha menciptakan hubungan yang simpatik dan bersahabat dengan informan guna meyakinkan informan bahwa peneliti akan meminta bantuannya dalam memperoleh masukan dan data tertentu. Langkah



selanjutnya peneliti berada di lokasi penelitian (*getting along*), dimana peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan sasaran peneliti, mencari informasi yang diperlukan secara lengkap dan berusaha sebagai partisipan yang terlibat langsung dengan objek sasaran dan mengamati objek sasaran penelitian secara cermat.

Pada tahap pengumpulan data (*Logging the data*), peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi partisipan (*participan observation*). Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, dimana tanya jawab dilakukan secara bebas namun terarah, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi lapangan. Sebelum melakukan proses wawancara dipersiapkan dulu bahan yang menjadi topik permasalahan dalam wawancara.
- b. Observasi lapangan dan partisipan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian mulai dari kegiatan pengumpulan data formal hingga mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan juga dilakukan dilokasi kelompok usaha bersama atau tempat tinggal penerima bantuan.

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik ini merupakan teknik mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada yang berguna untuk menunjang pengumpulan data, meliputi laporan resmi, bahan pustaka, laporan tahunan,

laporan hasil pelaksanaan kegiatan, Undang-undang, Perpu, Perpres, Permen, Inpres, petunjuk operasional kegiatan serta foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan sosial fakir miskin melalui kelompok usaha bersama.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif disini adalah data-data yang diperoleh dikelompok-kelompokkan dalam indikator-indikator penelitian, kemudian digali secara mendalam dengan melihat dan memahami secara sosial, kultural dan psikologis dari jawaban responden melalui wawancara dan kuesioner yang telah disebarakan serta melihat fenomena yang terjadi dan dampak yang ditimbulkannya.

Interaktif atau dengan tabel (statistika) dengan cara mentabulasi pengelompokan hasil-hasil dari analisis data kualitatif dan kuantitatif. Peneliti akan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

##### 1. Model analisis data

Menurut *Miles dan Huberman* (dalam Bungin, 2001) ada tiga komponen yang benar-benar harus diperhatikan dalam melakukan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif tersebut, yaitu: *data reduction, display data, conclusion drawing verification*.

##### a. *Data reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk memisahkan hal-hal yang penting dan tidak penting dari data-data yang terkumpul, sehingga nantinya data-data tersebut menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian.



Pada tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. *Display data* (Penyajian data)

Sajian data merupakan langkah yang dilakukan dengan membuat perencanaan kolom dalam bentuk matriks gambar (skema) dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

c. *Conclusion drawing verifikasi* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah seluruh proses analisis data telah selesai dilakukan, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat *tentatif*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*"



## 2. Keabsahan data

Moleong (2000) dan Nasution (1990) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu : *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

### a. *Credibility*

Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiry* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti dengan jalan : memperpanjang masa observasi, melakukan *peer debriefing* (hasil kajian didiskusikan dengan orang lain agar mendapatkan kritik dan saran), *triangulasi* (untuk mengecek kebenaran), *member check* (mengecek ulang garis besar berbagai hal yang telah disampaikan informan). Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut (Moleong, 2000:178). Triangulasi dalam penelitian ini adalah metode atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa : pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan para informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang didapat. Tehnik pemeriksaan keabsahan data peneliti ini selain menggunakan triangulasi metode juga menggunakan

triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan meminta penjelasan berulang kepada informan mengenai informasi yang telah diberikannya untuk mengetahui keabsahan atau ketegasan informasinya dalam suatu wawancara tambahan. Selain itu keterangan dari informan lain untuk mengetahui derajat kepercayaan informan tersebut

b. *Transferability*

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

c. *Dependability*

Kebergantungan dan kepastian untuk mengecek serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan mendiskusikan dengan pembimbing secara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan dilapangan setelah hasil penelitian dianggap benar, kemudian diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.





## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum

Secara geografis, luas wilayah administrasi Kota Pangkalpinang seluas 89,4 kilometer persegi. Batas wilayahnya meliputi sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka. Sebesar 46,2% luas lahan Kota Pangkalpinang digunakan untuk lahan pemukiman penduduk dan hanya 17,5% digunakan untuk lahan pertanian dari luas lahan yang tersedia seluas 1.562 hektar.

Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya, hal ini dikaitkan dengan pembangunan nasional dan daerah di provinsi yang baru, dimana Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan dan industri, perdagangan, jasa dan pemerintahan. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan dengan berbagai etnis antara lain : Etnis Melayu, Cina, Madura, Pugis, Padang, Batak, dan sebagainya. Namun, etnis yang paling banyak mendiami Kota Pangkalpinang adalah Melayu dan Cina. Etnis Melayu sebagian besar bermata pencaharian swasta (pegawai swasta, dagang, buruh) dan pegawai pemerintahan/negeri sedangkan etnis Cina mayoritas bermata pencaharian wiraswasta.

## B. Kondisi KUBE di Kota Pangkalpinang

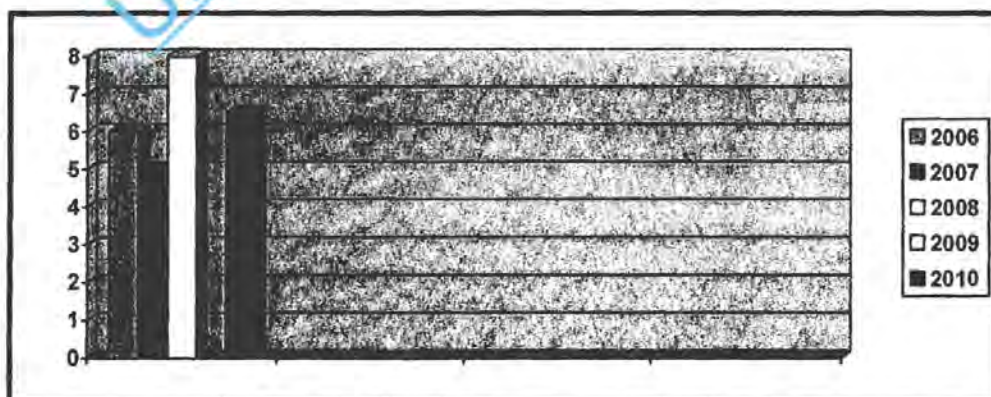
Berdasarkan hasil identifikasi Penulis terhadap kelompok-kelompok usaha bersama di Kota Pangkalpinang terdapat sebanyak 270 kelompok yang telah mendapat bantuan usaha ekonomi produktif, baik yang bersumber dari dana APBN maupun dari APBD provinsi. Tabel berikut menunjukkan kondisi kelompok usaha bersama yang ada di Kota Pangkalpinang saat ini.

Tabel 4.1 Jumlah Keseluruhan KUBE di Kota Pangkalpinang dari tahun 2006 - 2010

NO	Kecamatan	JUMLAH KUBE	KEADAAN KUBE SAMPAI SAAT INI	
			PRODUKTIF	NON PRODUKTIF
1.	Kecamatan Gerunggang	53	25	28
2.	Kecamatan Taman Sari	37	16	27
3.	Kecamatan Rangkui	50	15	35
4.	Kecamatan Pangkal Balam	67	30	37
5.	Kecamatan Bukit Intan	63	20	43
	<b>JUMLAH</b>	<b>270</b>	<b>100</b>	<b>170</b>

Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2010

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 270 kelompok usaha bersama yang sudah dibentuk dan memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif tidak mencapai setengah dari jumlah kelompok tersebut sudah tidak produktif.



Gambar 4.3 KUBE yang telah memperoleh bantuan di Kota Pangkalpinang



Data tersebut menunjukkan masih rendahnya sasaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Program pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui KUBE khusus untuk Kota Pangkalpinang tidak diprogramkan, baik melalui dana APBN maupun APBD Provinsi, sebab pada tahun 2009 kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama difokuskan pada kabupaten-kabupaten tertinggal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang mendapat alokasi KUBE sebanyak 35 kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 10 KK.

### C. Karakteristik Informan Pelaksana Program

#### 1. Komposisi Tingkat Umur Informan Pelaksana Program

Pada penelitian ini jumlah responden dari lembaga pelaksana program yang dipilih untuk dijadikan informan sebanyak 8 (delapan) orang. Umur mempengaruhi dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang hendak dilaksanakan agar target tercapai. Dari sejumlah 8 (delapan) informan yang diteliti rata-rata berumur 30-an tahun. Berikut ini adalah komposisi tingkat umur responden.

Tabel 4.2 Komposisi Tingkat Umur, Tahun 2010.

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	21 - 30	2	25,00
2	31 - 40	4	50,00
3	41 - 50	1	12,50
4	51 - 60	1	12,50
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Tabel 4.2 menunjukkan adanya perbedaan kelompok tingkat umur informan yakni dari 8 (delapan) orang informan, 4 (empat) orang atau sebesar 50 persen informan berusia 30-40 tahun, 2 (dua) orang atau 25 persen berusia 21-30 tahun, 1 (satu) orang atau 12,50 persen berusia 41-50 tahun, dan 1 (satu) orang atau 12,50 persen berusia 51-60 tahun.



serta masing-masing 1 (satu) orang atau sebesar 12,50 persen informan berusia 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Sehingga informan yang menjadi penelitian dari lembaga pelaksana program ini termasuk golongan usia kerja produktif. Menurut A.Ahyari (1992), usia kerja di Indonesia yaitu penduduk yang berusia 10 – 64 tahun yang biasa disebut dengan angkatan kerja. Sedangkan usia 30 - 40 tahun adalah usia kerja dengan produktivitas yang sangat tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa usia informan yang menjadi pelaksana dari program ini merupakan usia yang potensial dan produktif.

## 2. Komposisi Jenis Kelamin Informan Pelaksana Program, Tahun 2010

Informan yang menjadi pelaksana program dalam penelitian ini mayoritas adalah laki-laki dengan persentase 87,50 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Komposisi Jenis Kelamin , Tahun 2010.

No	Kelompok Jenis Kelamin	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	Laki-laki	7	87,50
2	Perempuan	1	12,50
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah informan laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan informan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana program di dinas kesejahteraan sosial provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

## 3. Tingkat Pendidikan Informan Pelaksana Program, 2010

Tingkat pendidikan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan dan pengambilan keputusan, karena dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan memiliki perencanaan yang lebih

matang dan berfikir panjang dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dengan memperhitungkan segala resiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya *miss-communication* atau kesalahan komunikasi, disposisi (penyelewengan atau salah sasaran) dan penempatan seseorang sesuai dengan kompetensinya.

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Informan, Tahun 2010.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	SLTA/SMA	3	37,50
2	Diploma	0	0,00
3	S-1	5	62,50
4	S-2	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

Sumber : Diolah dari data primer, 2010.

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) informan dimana 62,50 persen informan berpendidikan Strata Satu (S-1). Ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan responden yang terlibat dalam pelaksanaan program ini rata-rata sudah berpendidikan sarjana, sehingga disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini informan dianggap sudah bisa menilai dan memahami pelaksanaan program yang akan dijalankan. Hal ini juga untuk menjawab masalah kedua dalam penelitian ini, yaitu tingkat keberhasilan program, dimana tingkat pendidikan sangat berperan dalam menentukan setiap pelaksanaan program.

#### **D. Karakteristik Responden KUBE Produktif dan Non Produktif**

##### **1. Komposisi Tingkat Umur Responden, Tahun 2010**

Pada penelitian ini jumlah responden yang mewakili dari Kelompok Usaha Bersama produktif yang dipilih untuk dijadikan responden sebanyak 50 kelompok sedangkan responden Kelompok Usaha Bersama non produktif sebanyak 5 kelompok dan masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam KUBE



sebanyak 10 KK. Umur mempengaruhi dalam melakukan suatu kegiatan atau produktivitas yang dilaksanakan agar kegiatan dapat terlaksana dan target yang hendak dicapai terpenuhi. Berdasarkan jumlah 50 responden KUBE produktif dan 5 responden KUBE non produktif yang menjadi objek penelitian rata-rata berumur 31-an dan 41-an tahun. Berikut ini adalah komposisi tingkat umur responden.

Tabel 4.5 Komposisi Tingkat Umur Responden, Tahun 2010

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Responden		Persentase (%)	
		KUBE Produktif	KUBE Non Produktif	KUBE Produktif	KUBE Non Produktif
1	20 -30	5	4	10,00	80,00
2	31 - 40	15	-	30,00	-
3	41 - 50	14	-	28,00	-
4	51 - 60	10	-	20,00	-
5	61 keatas	6	1	12,00	20,00
	Jumlah	50	5	100	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa adanya perbedaan kelompok umur antara KUBE produktif dan non produktif. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 50 responden KUBE produktif sebanyak 15 kelompok atau 30,00 persen yang berusia antara 31 – 40 tahun, sedangkan yang berusia 61 tahun keatas sebanyak 1kelompok atau 12,00 persen. Menurut A.Ahyari (1992) usia kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia 10 – 64 tahun yang biasa disebut dengan angkatan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah responden yang termasuk golongan usia kerja yang potensial dan produktif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pembentukan KUBE.



## 2. Komposisi Jenis Kelamin Responden, Tahun 2010

Sebagian besar responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan persentase 74 persen dari KUBE produktif dan 80 persen dari KUBE non produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Komposisi Jenis Kelamin Responden, Tahun 2010

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden		Persentase (%)	
		KUBE Produktif	KUBE Non Produktif	KUBE Produktif	KUBE Non Produktif
1	Laki- laki	37	4	74,00	80,00
2	Perempuan	13	1	26,00	20,00
	Jumlah	50	5	100	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa jumlah responden laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan responden wanita. Terlihat sebanyak 37 kelompok produktif dari 50 kelompok adalah responden laki-laki dan 13 kelompok adalah wanita. Sedangkan responden KUBE non produktif dari 5 kelompok yang dijadikan responden, 4 kelompok adalah laki-laki dan 1 kelompok wanita dan masyarakat non KUBE yang dipilih dari 10 KK, 8 KK adalah laki-laki dan 2 KK adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok responden laki-laki lebih banyak dijadikan responden karena kelompok responden laki-laki mayoritas merupakan kepala keluarga dan ditunjuk sebagai ketua dalam KUBE, sehingga hasil dalam penelitian ini responden kelompok laki-laki lebih mendominasi.

## 3. Tingkat Pendidikan Responden, Tahun 2010

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan turut menentukan kemampuan seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai motivasi kerja dan kemampuan berusaha serta kreativitas yang tinggi dalam

menciptakan produk dan mampu bersaing dengan produk sejenis yang beredar dipasaran.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa sebagian besar kelompok responden memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, hanya beberapa kelompok responden saja khususnya ketua kelompok yang sempat menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA atau sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Tingkat Pendidikan Responden, Tahun 2010

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Responden		Persentase (%)	
		KUBE Produktif	KUBE Non Produktif	KUBE Produktif	KUBE Non Produktif
1	Tidak Sekolah	-	-	-	-
2	Tamat SD	13	-	26,00	-
3	SMP	14	2	28,00	40,00
4	SMA	23	3	46,00	60,00
5	D3/Sarjana	-	-	-	-
	Jumlah	50	5	100	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kelompok responden sangat bervariasi. Sebanyak 50 responden KUBE produktif terlihat bahwa responden yang berpendidikan tamat SD dan SMP cukup tinggi yaitu masing-masing 13 responden atau 26 persen dan 14 responden atau 28 persen. Sedangkan responden tamatan SMA mendominasi kelompok KUBE produktif ini yaitu 23 responden atau 46 persen.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dalam menentukan dan menilai sesuatu masalah. Tingkat pendidikan ini diambil untuk menjawab masalah kedua dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan kelompok responden KUBE akan menentukan dalam



mengetahui tingkat keberhasilan kelompok usaha bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah.

### **E. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin**

Implementasi program merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Input dari program ini adalah kebijakan dan program, sumber dana baik dari APBN maupun APBD, sarana dan prasarana yang tersedia serta SDM yang terlibat dalam implementasi program pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui proses komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi.**

Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah proses yang dilakukan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan program yang dilaksanakan baik kepada masyarakat penerima maupun kepada para pelaksana program atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Hasil analisis data dan wawancara lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pedoman umum atau juknis kegiatan sudah tersedia namun belum dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan pelaksana program tersebut hanya terfokus mengejar target serta tidak paham akan program yang dijalankan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Informan kunci. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Informan kunci:

*"...sejujurnya Saya katakan, bahwa program yang digulirkan oleh departemen sosial sudah sangat bagus, ada pedoman atau juknis yang dikeluarkan departemen sosial, namun sampai saat ini outcome yang*



*dihasilkannya jauh dari yang diharapkan, karena kegiatannya hanya sebatas mencapai output saja atau hanya mengejar target saja...”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa juklak/juknis sudah tersedia dan jelas sesuai dengan program yang dilaksanakan namun juklak/juknis tersebut belum menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan program tersebut, sedangkan sarana atau media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah melalui sosialisasi program., Sosialisasi program yang dilakukan masih sangat kurang meskipun landasan pelaksanaan kebijakan program sudah ada yaitu UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No.42 Tahun 1981. Hal ini terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Informan 1:

*“.....terus terang saya katakan, bahwa sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang, sehingga tidak heran jika masyarakat banyak yang tidak mengetahui program ini, apalagi ada bantuan usaha yang diberikan. Jadi kalau saya tangkap kesan dari masyarakat “ seakan-akan program ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah dikondisikan sebagai calon penerima bantuan, apalagi program bantuan ini terkesan proyek yang dipihak ketigakan.”...*

Sementara itu Informan kunci berpendapat bahwa :

*“...sosialisasi memang sangat kurang, semestinya masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan mengetahui dan diajak duduk bersama bahwa di dinas sosial ada program KUBE, sehingga mereka bisa berperan serta atau memadukan dengan program atau kegiatan sosial lainnya yang bersifat membantu masyarakat kurang mampu.. Sebenarnya juklak dan juknisnya sudah ada tinggal kita melaksanakannya dengan serius.....komitmen ..mensosialisasikan program ini.....”*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan 4:

*“.....program pengentasan kemiskinan merupakan program nasional pemerintah, jadi penanganannya harus melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat miskin itu sendiri, dunia usaha, lembaga pemerintah terkait, swasta, tokoh-tokoh masyarakat, agama dan lain-lain. Kalau saya lihat program yang dilaksanakan oleh dinas sosial ini kurang diketahui oleh dinas lain yang terkait, tokoh masyarakat dan dunia usaha artinya sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang,*

*padahal biasanya sosialisasi itu kan merupakan salah satu kunci keberhasilan program.....”*

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas menguatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sangat kurang, dimana kebanyakan masyarakat, dinas/ instansi lain yang terkait termasuk dunia usaha belum mengetahui secara jelas adanya program ini, sehingga perlu sosialisasi dalam bentuk seminar, penyuluhan maupun melalui media massa. Pelaksanaan program tersebut harus sesuai dengan rencana, waktu, tempat dan sasaran program sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pelaksanaan program kurang sesuai dengan rencana awal, kurang tepat sasaran serta waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan 2

*“ .....sebenarnya POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) sudah ada kita buat, dimana di dalam POK itu jelas rencana kerja, jadwal kegiatan, tempat, target atau sasaran sampai jumlah dana yang dialokasikan untuk program tersebut, namun karena banyaknya kepentingan dari para pelaksana kegiatan baik dari pejabat pembuat komitmen sampai pada pendamping dilapangan maka POK yang sudah dibuat tidak dijadikan patokan sebagai petunjuk untuk mengoperasionalkan kegiatan, sehingga rencana yang ditargetkan tidak terlaksana dengan baik....”*

pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemahaman para pelaksana terhadap program tersebut sangat kurang dan belum mengerti maksud atau tujuan sesungguhnya dari program tersebut. Sehingga tidak heran jika para pelaksana tersebut hanya berorientasi pada pencapaian target atau sasaran saja.

Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan Informan 3

*“.....dari hasil monitoring yang kita laksanakan, ternyata banyak terdapat kekurang efektifan dalam pelaksanaan program tersebut dan terlihat bahwa para pelaksananya kurang paham dan tidak mengerti maksud atau tujuan dari program tersebut....Jadi ndak heran kalau*



*kurang maksimal bahkan belum mencapai hasil yang diinginkan seperti tujuan diluncurkannya program KUBE tersebut.....”*

Hal ini dipertegas lagi oleh pendapat Informan kunci yang menegaskan bahwa :

*“.....kalau saya amati sebenarnya para pelaksana kegiatan itu ndak paham dengan program yang dijalankan tersebut.....sudah ndak paham, mereka juga malas baca buku.padahal buku-buku yang menjadi pedoman atau acuan bagi program tersebut cukup banyak .....”*

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Informan 1

*“...sejujurnya saya katakan, memang banyak pedoman atau juknis yang dikeluarkan Departemen Sosial, namun tidak sepenuhnya saya dapat pahami dan juga terapkan...tapi, saya yakin staf saya memahami dan melaksanakannya dengan baik.yang pasti UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara/melayani orang-orang miskin...”*

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa ketidakpahaman para pelaksana dengan program yang dijalankan akibat dari kurangnya membaca pedoman pelaksanaan yang sudah ada serta menggunakan petunjuk operasional kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Sedangkan para pelaksana program yang terlibat dalam implementasi program ini adalah kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran, kepala bidang pemberdayaan sosial selaku pejabat pembuat komitmen, kepala seksi pemberdayaan fakir miskin selaku penanggungjawab teknis kegiatan, staf pelaksana dan pendamping KUBE.

## **2. Disposisi**

Disposisi dalam hal ini adalah kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana program. Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara dengan informan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggungjawab berhasil tidaknya program ini ada ditangan kuasa pengguna anggaran selaku kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian secara administrasi kepala dinas melimpahkan



tanggungjawab kepada pejabat pembuat komitmen selaku kepala bidang dan secara teknisnya kepala bidang melimpahkan kepada penanggungjawab kegiatan selaku kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa ada koordinasi atau kerjasama yang tidak berjalan secara efektif antara kuasa pengguna anggaran dengan pejabat pembuat komitmen dan pelaksana teknis kegiatan, dimana perintah atasan yakni kuasa pengguna anggaran tidak direspon dengan baik oleh pembuat komitmen hingga timbul perintah yang tidak jelas dan koordinasi yang dilakukan sangat kurang sehingga program yang dilaksanakan terkesan kurang tepat sasaran. Pendapat ini diutarakan oleh Informan kunci sebagai berikut :

*“.....saya sering memanggil Kabid selaku pejabat pembuat komitmen....agar setiap masukan dari kepala seksi selaku pelaksana teknis dan staf kegiatan bisa diakomodir dan didengan masukan mereka...karena kita bekerja bukan personal tapi kita bekerja dengan team, berhasilnya program ini bukan karena seseorang, tapi karena team....jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri..kita ini bekerja dalam team....kalau team kita solid maka hasilnya pun akan bagus..sebaliknya begitu juga...ini saya lihat bekerja sendiri-sendiri..., makanya hasilnya pun saya bisa pastikan kurang maksimal..bahkan ada yang melapor dengan saya banyak yang tidak tepat sasaran.....”*

Hasil wawancara dengan Informan 4 penulis juga mendapatkan informasi bahwa kurangnya tanggungjawab staf terhadap pelaksana kegiatan. Hal ini disebabkan staf yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut kebanyakan tenaga honorer/PHL, dimana mereka belum atau tidak memahami tujuan dari program tersebut. Informan 4 mengatakan :

*“.....kalau kita lihat di program ini buku-buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan sangat banyak, tapi staf yang ada kurang minat membaca buku-buku tersebut, mereka berfikir hanya berorientasi pada uang...karena mereka bukan pegawai hanya honorer proyek sehingga tanggungjawab mereka hanya sebatas bekerja apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tanggungjawabnya sangat kurang....”*

Dalam wawancara juga terungkap bahwa keberadaan staf atau personel yang *eligible* atau memenuhi syarat sangat dibutuhkan, hal ini akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 2

*".....sejujurnya saya sangat berat melaksanakan program ini kalau tidak didukung oleh tenaga-tenaga atau staf yang handal terutama yang berstatus PNS sebab saya ndak bisa bekerja sendiri..saya juga agak kecewa dengan keadaan staf yang ada, sebab saya sudah sering meminta tambahan staf yang berkualifikasi sarjana sosial untuk membantu di seksi pemberdayaan fakir miskin, tapi justru staf yang dimaksud ditempatkan dibidang lain, jadi kami bekerja dengan staf yang ada walaupun sangat kurang....."*

Staf yang melaksanakan program tersebut berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terungkap bahwa latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan, sehingga dedikasi terhadap tugas sangat kurang. Hal ini dinyatakan oleh Informan 4

*...." kalau menurut saya latar belakang pendidikan juga sangat mendukung dalam setiap pekerjaan...ndak terkecuali dalam program ini, sebab kalau pendidikan sudah tepat sesuai persyaratan, saya rasa penyesuaiannya tidak terlalu sulit dan ini akan menimbulkan efek kesenangan akan pekerjaan sebab akan terasa manfaat dari pendidikan yang bertahun-tahun diperoleh sehingga akan menimbulkan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan..."*

Kepatuhan terhadap perintah-perintah atasan. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa adanya pengabaian perintah atau penyimpangan oleh staf dibawahnya lebih disebabkan oleh adanya kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Informan kunci yang menyatakan:

*".....saya heran dengan staf ini, banyak yang pintar-pintar tapi ndak paham dengan pekerjaan, kita instruksikan begini ...malah instruksi kita ndak diindahkan..bahkan kita buat resmi dengan suratpun ..masih saja susahnya minta ampun..misalnya kita minta laporan pertanggungjawaban pekerjaan atau sampai dimana realisasi fisik dan*



*keuangan saat ini...susah kita minta laporannya...jadi saya kira loyalitas mereka bisa dipertanyakan terhadap atasan..."*

Selanjutnya Informan 3 mengungkapkan :

*".....dari hasil monitoring kita dilapangan banyak kita temukan ketidaksi-kronan antara perencanaan yang dibuat dengan realitas dilapangan, bahkan bisa dibilang tidak tepat sasaran...apa yang diatur dalam juknis dengan sasaran yang dilapangan,.....sepertinya pelaksana-nya kurang paham dan tidak membaca juknis yang ada..."*

Hal lain yang juga terungkap dalam wawancara adalah kurang tegasnya perintah atasan terhadap bawahannya. Akibat kurang tegasnya perintah atasan terutama kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran mengakibatkan perintah tersebut kurang direspon oleh bawahannya. Hal tersebut terungkap dari Informan 5 dan Informan 7 yang mengatakan:

*".....menurut saya kepala dinas harus lebih tegas dalam mengeluarkan perintah atau instruksi kepada bawahannya termasuk dalam pelaksanaan program karena kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran, yang saya lihat sebenarnya peran kepala dinas sangat kurang bahkan sangat lemah dalam hal ini, yang terlihat justru kepala bidang atau pejabat komitmen yang sangat dominan....."*

Berdasarkan hasil wawancara juga terungkap bahwa adanya pengaruh birokrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program, hal ini terlihat dari lambatnya pelaksanaan program tersebut dari jadwal yang telah direncanakan. Karena sering adanya pergantian pejabat ditingkat struktural mengakibatkan program mengalami ketertundaan dalam pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Informan 2 dan Informan 3 sebagai berikut :

*".....adanya keterlambatan pelaksanaan program ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya pergantian pejabat struktural (eselon II dan III) hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebab pejabat yang baru harus menunggu SK penetapan mereka sebagai pejabat pelaksana program yang baru....."*  
*".....adanya pergantian pejabat yang baru ini tentunya akan mempengaruhi loyalitas atau kepatuhan staf terhadap atasannya, apalagi kepentingan pribadi mengikuti pejabat yang bersangkutan...."*



Sementara itu Informan 4 mengungkapkan

*“.....saya melihat cara berpikir mereka orientasinya pada uang bukan pada program, bukan bagaimana agar tujuan program tersebut bisa tercapai dan saya melihat kecenderungannya lebih pada proyek oriented, makanya ndak salah kalau setiap orang berpikir ada uangnya jalan ndak ada uangnya nanti dulu....jadi sosial orientednya nomor 18...”*

Unsur kepentingan dalam pelaksanaan program sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa unsur kepentingan sangat mendominasi dalam pelaksanaan program tersebut apalagi kegiatan atau program tersebut masih berorientasi pada proyek yang sifatnya tahunan dan memerlukan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan bantuannya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan terungkap bahwa kegiatan pengadaan bantuan untuk KUBE ini sudah ditetapkan pihak-pihak mana saja sebagai pelaksananya. Karena unsur kepentingan sangat mendominasi dalam program ini, maka bisa dipastikan tujuan program pun hanya mengejar target atau sasaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan kunci di atas. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa koordinasi yang hirarki dapat menyebabkan lambatnya pelaksanaan program. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Informan 2

*“.....karena kewenangan dari program ini sifatnya hirarki, maka secara administratif pelaksana teknis dilapangan harus berkoordinasi dengan pejabat di atasnya, pada tahap koordinasi inilah terkadang terjadi ketidakpahaman pejabat di atas akan tahap-tahapan kegiatan dan aturan teknis dilapangan yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi sedikit tertunda.....”*

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kewenangan struktural pelaksanaan program mengalami hambatan dalam hal koordinasi, dimana ego atau rasa keakuan setiap orang berbeda. Untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program baik dalam bentuk

bantuan maupun pengelolaanya. Hasil wawancara terungkap bahwa penyimpangan kebanyakan disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan termasuk pejabat teknis yang bersangkutan dalam memahami tujuan program tersebut. Pola pikirnya hanya orientasi pada proyek, hasil yang diharapkan hanya pada output-nya saja. Temuan dilapangan juga sering terjadi salah sasaran. Sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan Informan kunci:

*".....terus terang bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial provinsi banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya layak mendapat bantuan tidak dapat, tapi yang tidak layak justru mendapat bantuan. Inikan artinya tidak ada seleksi yang benar-benar dilakukan atau ada juga kedekatan dengan pejabat atau pengurus baik lurah/kades maupun perangkatnya. Kemudian juga bantuan banyak yang belum atau tidak di manfaatkan, karena peralatannya kurang lengkap, jadi kesannya memberikan bantuan asal beri saja....."*

*"...suat kami bersama anggota DPRD provinsi kunjungan ke lapangan, apa yang telah kita perbuat sudah sesuai terutama sasaran penerimanya tepat sasaran...hanya terus terang saya masih belum puas, karena bantuan usaha yang diberikan ada yang tanggung..."*

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya koordinasi dan kerjasama yang belum terjalin dengan baik antara para pelaksana program dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian terlihat adanya pemahaman yang tidak sama antara para pelaksana teknis lapangan dengan pengambil kebijakan.

### **3. Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia baik staf pelaksana maupun pejabat pelaksana serta wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan program adalah kepala dinas (selaku kuasa pengguna anggaran/KPA), kepala bidang pemberdayaan sosial (selaku pejabat pembuat komitmen/PPTK), kepala seksi pemberdayaan fakir miskin



(selaku pelaksana teknis kegiatan), 1 (satu) orang staf pemberdayaan fakir miskin (PNS) dan 4 (empat) orang tenaga harian lepas (Honerer APBN). Tenaga pengelola program terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8  
Jumlah Tenaga Pengelola Program  
Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Dinas Kesejahteraan Sosial  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2009/2010

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOL	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	Pembina Tk.I/IV.b	PNS	SI
2.	Kepala Bidang	Penata Tk.I/III.d	PNS	SI
3.	Kepala Seksi	Penata/III.c	PNS	SI
4.	Staf	Pengatur Muda/II.a	PNS	SMA
5.	Staf	-	PHL	SI
6.	Staf	-	PHL	SMA
7.	Staf	-	PHL	SI
8.	Staf	-	PHL	SMA
<b>Jumlah</b>		<b>8 Orang</b>		

Sumber : Kepegawaian Dinkessos Provinsi BaBel, 2010

Berdasarkan data pada tabel 4.7 terlihat bahwa jumlah pengelola program yang langsung terlibat sebanyak 8 (delapan) orang, dimana tenaga honorer sebanyak 50 persen terlibat langsung dalam program tersebut, hal ini akan berdampak pada efektivitas dan pemahaman terhadap program. Dari sisi pengalaman kerja masih tergolong muda dan masih perlu pembinaan walaupun termasuk tenaga-tenaga muda yang memiliki motivasi kerja tinggi, namun minim pengalaman.

Kenyataan ini disampaikan oleh Informan 1:

*"...memang dari sisi jumlah pegawai dibandingkan dengan seksi lainnya belum memadai, namun motivasi dan semangat kerja staf sangat bagus...yang perlu dilakukan ke depan dalam hal ini adalah secara terus menerus membina mereka terutama keterampilan teknis dan pengetahuan pekerjaan sosialnya..."*

Hasil wawancara juga terungkap bahwa staf atau personel yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini diungkapkan oleh Informan.2



*“.....dalam melaksanakan kegiatan ini kita masih kekurangan staf atau personel yang membantu pelaksanaan program, staf yang ada hanya 5 (lima) orang dimana 4 (empat) diantaranya adalah tenaga honorer itupun tidak didukung dengan pendidikan yang disyaratkan dalam program ini, misalnya sarjana sosial atau diploma komputer yang memang dibutuhkan dalam membantu program ini.....”*

Selanjutnya Informan 2 mempertegas lagi:

*“.....memang dari sisi gaji atau honor yang diberikan kepada tenaga honorer ini perbulannya masih sangat kecil, hal inilah yang kadang-kadang membuat kita mutar otak juga gimana supaya mereka juga bisa mendapatkan tambahan honor, apalagi jaminan kerja mereka tidak ada..asuransi misalnya....inikan sangat rawan lain kalau mereka pegawai negeri....”*

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan staf sangat urgensi, sementara alokasi dana yang tersedia sangat terbatas disamping itu tidak adanya jaminan kerja bagi mereka, sehingga bisa disimpulkan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi kinerja staf tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terungkap pula bahwa belum ada pelatihan atau bimbingan yang diberikan kepada calon penerima bantuan KUBE baik pelatihan teknis maupun manajemen atau administrasi KUBE, koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain dalam membantu secara teknis masih sangat kurang. Terlihat juga tidak adanya diklat khusus bagi staf yang akan melaksanakan program atau kegiatan tersebut, yang ada hanya pelatihan petugas pendamping kelompok saja. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Informan kunci :

*“..... disamping kurangnya tenaga pelaksana dilapangan, juga kurangnya pemahaman pelaksana dilapangan, padahal buku-buku petunjuk sudah ada namun sumber daya manusiannya malas membaca, apalagi sosialisasinya kurang serta kurangnya peningkatan SDM yang diperlukan artinya sebelum program dilaksanakan pejabat atau pengelola program atau kegiatan yang akan melaksanakannya harus dilatih dulu, yang ada sekarang hanya pelatihan pendamping KUBE saja, sedangkan pelatihan untuk KUBE nya belum ada....”*

Selanjutnya Informan 2 menungkapkan :

*".....pentingnya diklat atau pelatihan bagi calon pengelola program ini akan berdampak pada tujuan akhir program, artinya sebelum mereka menjalankan program ini, mereka sudah dibekali pengetahuan dan manajemen pengelolaan program, semestinya bila di APBN tidak dianggarkan maka di APBD harus dianggarkan karena ini menyangkut capacity building ...ini yang menjadikan pejabat baru.. disodorkan dengan program yang belum dia ketahui, baca juklak/juknis malas..akhirnya program berjalan yang penting selesai....kalau tiap tahun seperti ini sama saja seperti menabur garam dilautan...."*

Program pemberdayaan masyarakat miskin berada pada bidang pemberdayaan sosial dengan seksi khusus yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga program ini berada pada tupoksi seksi pemberdayaan fakir miskin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 3 :

*"...secara struktural penanganan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin dibawah seksi pemberdayaan fakir miskin. Pada tahun 2007 seksi tersebut ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt) untuk membantu tugas sehari-hari..karena sebelumnya seksi ini bergabung dengan bidang bantuan dan jaminan sosial, baru pada tahun 2007 dipisah dan bergabung dengan bidang pemberdayaan sosial. Jadi termasuk seksi baru yang mengurus masyarakat miskin."*

Koordinasi merupakan kata kunci dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau program. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa koordinasi dalam pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, masing-masing bidang berjalan sendiri-sendiri serta belum adanya perencanaan secara menyeluruh dari setiap program yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Informan kunci sebelumnya, bahwa :

*"..... berhasilnya program ini bukan karena seseorang, tapi karena team.....jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri..kita ini bekerja dalam team....kalau team kita solid maka hasilnya pun akan bagus..sebaliknya begitu juga...ini saya lihat bekerja sendiri-sendiri...,makanya hasilnya pun saya bisa pastikan kurang maksimal..bahkan ada yang melapor dengan saya banyak yang tidak tepat sasaran....."*

Selanjutnya Informan I mengungkapkan :

*"...memang program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE ini dikelola oleh dinas kesejahteraan sosial provinsi dari dana*



*dekonsentrasi dan sedikit dana APBD provinsi...tapi berapa banyak KUBE yang dilayani angka detilnya saya tidak mengetahui, coba tanyakan ke penanggung jawab kegiatan atau kepala seksinya...yang jelas kita telah membantu masyarakat miskin, apalagi keterlibatan masyarakat sejauh ini belum ada dan informasi berapa jumlah orang yang diberdayakan oleh masyarakat belum tahu.....”*

Informan kunci mengungkapkan:

*“...anggaran berasal dari Dapsos RI melalui dana dekon dan ada juga dari dana APBD provinsi tapi sangat kecil jumlah masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE yang sudah diberdayakan di Kota Pangkalpinang sampai tahun 2009 baru 200-an kelompok...yang dari masyarakat tidak diketahui ada tidaknya..”*

Berdasarkan pernyataan ini juga menunjukkan bahwa belum adanya keterlibatan pihak swasta atau masyarakat secara konkrit dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal lain juga menunjukkan bahwa dalam perencanaan program belum terdapat satu unit perencana teknis yang menangani masalah perencanaan setiap program. Perencanaan hanya dibuat berdasarkan pertimbangan jumlah sasaran dan lokasi kegiatan, maka tidak heran jika jadwal pelaksanaan dan proses penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan bahkan kegiatan bisa melewati batas waktu yang ditentukan.

#### **4. Struktur Birokrasi/Kelembagaan**

Seperti yang telah diutarakan di atas, birokrasi juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program, hal ini karena birokrasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dalam suatu organisasi. Sebagai penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan



Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok seksi pemberdayaan sosial fakir miskin yakni melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pemberdayaan sosial fakir miskin.

Uraian tugas seksi pemberdayaan sosial fakir miskin sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang penyiapan kondisi sosial, pengembangan kehidupan sosial, kerja sama dan pengembangan usaha serta pengembangan lembaga keuangan mikro sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis bidang penyiapan kondisi sosial, pengembangan kehidupan sosial, kerja sama dan pengembangan usaha serta pengembangan lembaga keuangan mikro sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan pembina staf
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Proses pengawasan atau evaluasi merupakan salah satu prosedur kerja dalam birokrasi. Pengawasan dan pemeriksaan dalam hal ini adalah pengawasan atau evaluasi hasil pelaksanaan program, dimana mestinya melibatkan masyarakat atau lembaga independen sehingga hasil yang didapat bisa dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program yang sama di masa yang akan datang. Pemeriksaan hasil kegiatan sampai saat ini masih dilakukan oleh inspektorat jenderal Depsos RI bekerjasama dengan Bawasda provinsi. Tujuan pengawasan sebenarnya adalah untuk mengontrol dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program yang mana harus berdampak pada kemajuan dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan kabupaten/kota dalam pengawasan ini sebenarnya akan lebih efektif karena program tersebut berada di wilayah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan pendapat Informan kunci :

*".....kita diprovinsi hanya sebagai koordinator yang ndak punya wilayah, wilayah itu punya kabupaten/kota, mereka sebenarnya lebih tahu keadaan program tersebut diwilayah mereka...."*

*".....saya belum melihat adanya kerjasama dalam hal pengawasan ini, padahal aturan pelaksanaannya jelas sekali, ada jenjang pengawasannya mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, nah ini saya lihat belum berjalan..."*

*"...monitoring tetap kita lakukan, hanya terus terang kegiatan evaluasi jarang dilakukan, kalaupun dilakukan baru sebatas bantuan usaha bukan evaluasi program secara keseluruhan...sebetulnya penting sih, tapi belum sampai kesitu lah..untuk laporan kita buat laporan realisasi keuangan dan fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan...kami tidak terima laporan berkala dari pendamping sosial dalam melaporkan hasil pendampingannya.."*

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pengawasan dan monitoring yang dilakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan hanya dilakukan oleh para pelaksana yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian belum adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program, evaluasi hanya dilakukan sebatas evaluasi bantuan saja, bahkan adanya indikasi hanya dilakukan sebagai persyaratan kegiatan saja. Hal ini diperkuat oleh pendapat Informan 3:

*".....kalau saya lihat monev yang dilakukan hanya sebatas formalitas saja untuk mencairkan dana operasional monev, apalagi monevnya dilakukan hanya sekali pada akhir tahun, padahal monitoring itu bisa dilakukan kapan saja ada kesempatan tidak mesti menunggu dana operasional monev keluar. Kita bisa melibatkan pendamping yang ada di kecamatan dan desa-desa/kelurahan, karena mereka memang berada di wilayah dampungannya, saya kira monev akan lebih efektif dan efisien....."*

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan hanya sekedar formalitas saja, tidak menyentuh akar permasalahan yang selama bertahun-tahun terjadi, sementara biaya yang dikeluarkan sudah terlalu banyak. Sementara itu instansi atau lembaga yang terkait lainnya tidak diikutkan dalam pelaksanaan pengawasan program. Pengawasan hanya dilakukan oleh internal bidang, bahkan bidang terkait tidak



dilibatkan dalam pengawasan baik melalui monitoring maupun evaluasi program sehingga banyak ditemukan penyimpangan dan permasalahan yang sama muncul ditahun selanjutnya. Informasi ini diungkapkan oleh Informan kunci :

*".....selama ini belum ada pelatihan himbangan teknis KUBE, misalnya kalau KUBE bidang industri mereka harus dibina dinas perindustrian, bidang perikanan ke dinas perikanan, bidang pertanian ke dinas pertanian, pertukangan atau perbengkelan ke Balai Latihan Kerja dan Industri. Kemudian instansi lainnya pun mungkin tidak mengetahui adanya program semacam ini karena tidak diinformasikan atau disebarluaskan atau mungkin tidak adanya kejelian pelaksana atau pengelola sampai level hawah melihat hal-hal semacam ini dan instansi lainnya juga mungkin tidak tahu kalau adanya KUBE-KUBE yang telah dibantu atau dibina dinas sosial....."*

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan juga bahwa koordinasi dan kerjasama antar dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota sangat kurang. Sedangkan keterlibatan instansi lain dalam program ini belum ada, walaupun ada lebih kepada pelatihan petugas pendampingnya bukan pada teknis usahanya, misalnya dinas pertanian pada kelompok pertanian, dinas perikanan pada kelompok nelayan atau dinas perindustrian pada kelompok home industri. BLKI pada kelompok perbengkelan dan pertukangan dll, sehingga setiap kelompok ada keberlangsungannya dan dibawah pengawasan dinas teknis. Dinas sosial hanya sebagai pioner atau pemberi bantuannya sedangkan pembinaan lanjutannya diserahkan pada masing-masing dinas teknis. Dari hasil analisa juga menunjukkan bahwa lemahnya tingkat koordinasi dan informasi yang dilakukan oleh pelaksana program, kurangnya penyebarluasan informasi tentang program dan terlihat juga bahwa program yang ada disetiap dinas/instansi hanya berjalan sendiri-sendiri, padahal masalah kemiskinan merupakan masalah bersama bangsa dan penanggulangannya harus melibatkan lintas sektoral. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Informan 4 :



*".....belum ada kita kerjasama dengan instansi lain dalam hal pembinaan terhadap kelanjutan program KUBE ini, tapi yang pasti kabupaten/kota yang tidak merespon program ini departemen tidak akan mengalirkan bantuan untuk daerah itu...jadi mesti ada sharing buget atau peran pemda dalam membantu program ini...."*

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kerjasama dengan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab ditingkat kabupaten/kota serta peran pendamping sangat menentukan dalam membantu keberhasilan program ini. Koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan belum ada apalagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program ini sama sekali belum dilibatkan. Kalau kita lihat dari beberapa pernyataan dan pendapat tersebut di atas, masyarakat hanya dijadikan objek sasaran atau target kegiatan, belum terlihat adanya keterlibatan mereka dalam program. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah terungkap dari hasil wawancara bahwa prosedur kerja yang telah dibuat tidak dijalankan dengan baik. POK dibuat hanya sebagai formalitas saja, karena realitas dilapangan cukup berbeda dengan POK yang dibuat. Standar yang ingin dicapai program tersebut sebenarnya sudah tersusun dalam pedoman umum program. POK yang dibuat belum mampu diimplementasikan secara utuh dan substantif. Selain itu, setiap pengelola program diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan untuk dijadikan pedoman kerja. Kenyataan ini dipertegas dari pernyataan beberapa Informan.

Informan 1:

*"...Saya pikir semua yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksana juklak/juknis untuk melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin sudah ada dan sangat memadai, hanya saja mungkin tidak secara total dapat diikuti...saya sendiri baru mulai mengenal istilah-istilah sosial, apalagi detilnya saya rasa belum lah dan setahu saya setiap pelaksana kegiatan diharuskan membuat*

*POK/ROK sebagai pedoman teknis yang harus diikuti, untuk implementasinya saya kurang tahu atau berapa persen yang bisa dipedomani”.*

Informan 2:

*“...bukannya tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada secara pemih, melainkan kadangkala kita dihadapkan pada realita lapangan yang belum memungkinkan untuk diterapkan...contohnya soal kriteria penerima, besarnya nilai yang diinginkan, kriteria pendamping dan sebagainya..”*

Informan 4:

*“...juklak/juknis ada dan biasanya diberikan oleh direktorat pemberdayaan fakir miskin setiap tahun, selanjutnya kita diminta untuk membuat semacam panduan operasional kegiatan...dalam implementasinya kadang-kadang terlupakan, maksudnya sering menyimpang mungkin soal waktu, tempat, peserta dan lain sebagainya...kita mengerti sebenarnya harus merujuk pada itu, tapi kendala teknis di lapangan berkata lain...”*

Departemen Sosial RI juga sudah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesejahteraan sosial sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 3 :

*“..... kalau standar operasional prosedur (SOP) kita ndak punya, karena kita bukan perusahaan atau swasta, tapi kalau standar pelayanan minimal kita punya, karena kita adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh departemen sosial RI sebagai tindaklanjut UU.No.11 tahun 2009.....”*

Sementara itu pendapat lain dikemukakan oleh Informan kunci :

*“.....kita memang tidak punya SOP, namun ada standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh departemen sosial, SPM inilah yang merupakan rujukan bagi kita dalam melaksanakan pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial.....”*

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terungkap bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan SPM ini lebih pada masalah teknis, seperti program yang bersifat tahunan, adanya pergantian para pelaksana



kegiatan setiap tahunnya, kekurangan staf atau personel PNS serta kurang dipahaminya standar pelayanan minimal yang sudah ada. Hal inilah yang menimbulkan program berjalan tetapi tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksana program. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan kunci :

*"...saya kira sudah berapa banyak dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin melalui kelompok usaha ini, namun bisa kita hitung berapa persen saja yang masih berjalan dan berkembang, artinya program ini harus dibenahi lagi atau ditata kembali sistem pelaksanaannya, sebab kalau menurut saya programnya sudah sangat bagus, tinggal implementasinya yang harus ditata kembali..."*

Sementara itu pola operasional program pemberdayaan sosial masyarakat miskin sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau pedoman umum pelaksana program pemberdayaan sosial fakir miskin Departemen Sosial mencakup struktur program, komponen kegiatan, bantuan stimulan dan media pemberdayaan. Struktur program dimulai dari tahap prakondisi (T-0) pada tahun pertama sampai tahap kemandirian dan terminasi (T-IV) pada tahun kelima. Mulai dari tahap observasi atau studi kelayakan, tahap proses penumbuhan KUBE, tahap pemberian bantuan stimulan, kemudian tahap pengembangan KUBE produktif hingga pada tahap terminasi yaitu KUBE yang dikategorikan mandiri akan dirujuk pada perbankan dengan sistem pinjaman dengan bunga lunak seperti KUR.

#### **F. Analisis Hasil Wawancara Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama**

Proses pengusulan kelompok usaha bersama dimulai dari desa dan di desa ada pendamping kelompok yang ditunjuk dari dinas sosial kabupaten/kota. Pembentukan kelompok ini didasarkan atas kesamaan jenis usaha atau

kesepakatan sesama calon penerima bantuan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Responden 1, 2, 5 8, 10, dan Responden X1,X2 dan X3 :

*“.....kalau pembentukan kelompok kita sepenuhnya serahkan kepada anggota yang memilih, pendamping hanya sebatas memberikan masukan pada kelompok tersebut. Memang kesulitan kita adalah menyatukan orang-orang yang berbeda latar belakang dan keinginan untuk berusaha, jadi tidak heran bila pendamping langsung berinisiatif membentuk kelompok usaha bersama tersebut, dari pada mereka tidak jelas siapa dan bagaimana kelompok mereka.....”*

*“... Misalnya dalam satu desa ada orang miskin kita kelompokkan kemudian kita ajukan ke desa/kelurahan untuk seterusnya diserahkan ke kabupaten/kota.....”*

Sementara itu pendapat dari Responden 12 dan 40:

*“.....saya kira sebaiknya pembentukan kelompok usaha untuk orang miskin itu harus didasarkan atas kesepakatan anggotanya bukan atas dasar sekehendak pendamping saya lihat yang terjadi justru ada masyarakat yang tidak tahu mereka masuk dalam keanggotaan KUBE, tahu-tahu mereka dipanggil untuk tandatangan, inikan namanya asal-asalan untuk mendapatkan bantuan, bahkan kadang-kadang mereka yang dijadikan objek, di data, minta copy KTP lalu nama mereka dimasukkan dalam anggota kelompok yang akan mendapatkan bantuan, begitu bantuan turun atau datang, mereka dipanggil untuk tandatangan...ini yang saya lihat terjadi.....”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa intervensi pendamping sangat besar sekali dalam proses pembentukan kelompok, oleh sebab itu harus ada komitmen pelaksana yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada petugas pendamping dilapangan tentang batas-batas keterlibatan para pendamping tersebut, dalam hal ini jelas bahwa partisipasi mereka dalam menyampaikan aspirasi belum berjalan dengan baik. Biasanya satu kelompok terdiri dari 5 – 10 orang yang ditetapkan satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan sisanya anggota. Melalui mekanisme kelompok, bantuan stimulan usaha dilakukan berdasarkan kepentingan dan



kesepakatan kelompok untuk memulai jenis usahanya. Persoalan yang sering muncul, karena masing-masing individu memiliki kepentingan dan motivasi usaha yang beragam, maka kondisi seperti ini yang memicu pecahnya kelompok dan pada akhirnya bantuan yang diberikan dibagi-bagi atau dijual. Kenyataan ini disampaikan oleh Responden 24:

*"...menurut hemat Saya, di daerah ini bagusya bantuan diberikan secara perseorangan tidak kelompok, karena watak orang sini sulit diperintah dan maunya memerintah.."*

Pendapat yang sama dari Responden 9:

*"...sejajurnya dari sisi efektif lebih baik bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada orang perseorangan daripada kepada kelompok...banyak kelompok diberikan bantuan usaha tapi yang menikmatinya kebanyakan ketuanya saja, anggotanya hanya sebagai pelengkap kelompok.."*

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa kelompok usaha bersama ini tidak mempertimbangkan potensi lokal yang ada diwilayah mereka. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Responden 19 :

*".....Bantuan yang diberikan kepada KUB) masyarakat miskin ini adalah dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana produksi berupa alat-alat atau barang yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat....."*

Responden 7 mengungkapkan:

*".....memang agak sulit kita melihat potensi lokal yang ada diwilayah kita sebab bantuan yang diberikan sangat terbatas dan bersifat kelompok, sedangkan kita masing-masing punya kemauan dan kemampuan masing-masing berbeda....."*

*".....terus terang bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial provinsi banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang mengajukan minta bantuan ini tapi yang diberikan itu, memang kita berterima kasih atas bantuannya tetapi inikan namanya mubasirkalau tidak sesuai permohonan..."*

Sementara Responden 15 mengungkapkan :

*".....ada juga yang seharusnya layak mendapat bantuan tidak dapat, tapi yang tidak layak justru mendapat bantuan. Inikan artinya tidak ada seleksi yang benar-benar dilakukan atau ada juga kedekatan dengan pejabat atau pengurus baik lurah/kades maupun perangkatnya. Kemudian juga bantuan banyak yang belum atau tidak di manfaatkan, karena peralatannya kurang lengkap, jadi kesannya memberikan bantuan asal beri saja....."*

Bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha bersama ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada mereka guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan membentuk wadah kerjasama, persaudaraan serta kesetiakawanan sosial. Oleh sebab itulah bantuan diberikan dalam bentuk kelompok bukan perorangan atau individu. Dari hasil wawancara terungkap adanya keinginan masyarakat agar bantuan tersebut diberikan dalam bentuk perorangan, sebagaimana pendapat Responden dibawah ini :

Responden 5 dan 17 :

*"...banyak warga yang meminta bantuan melalui kelompok, namun banyak pula yang gagal karena ketuntan bantuan...bahkan ada yang belum jalan usahanya sudah dibagi-bagi, padahal bantuan usaha tersebut untuk usaha kelompok..yang sangat memprihatinkan seolah-olah sang ketua yang menguasai bantuan usaha itu.."*

Pendapat Responden 8 dan 34:

*"...sejujurnya dari sisi efektif lebih baik bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada orang perseorangan daripada kepada kelompok...banyak kelompok diberikan bantuan usaha tapi yang menikmati kebanyakan ketuanya saja, anggotanya hanya sebagai pelengkap kelompok.."*

Responden 11:

*"....meskipun saya baru mengenal istilah bantuan usaha ekonomi produktif, menurut hemat saya, memang bagus nya bantuan tersebut langsung untuk anggota kelompok atau individu, karena banyak yang bisa kembang..."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas terungkap bahwa keinginan masyarakat agar pola bantuannya tidak dalam bentuk kelompok, tetapi dalam



bentuk perorangan atau individu. Hal ini menandakan bahwa belum adanya kesetiakawanan sosial atau kebersamaan yang muncul pada diri masyarakat miskin tersebut, bahwa tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk bersama-sama berdaya upaya dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinannya sebagaimana tujuan dari dibentuknya KUBE tersebut. Sementara itu kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber-sumber produktif dalam meningkatkan pendapatan mereka seperti pemanfaatan potensi lokal dan peluang yang ada belum dapat terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan lapangan diketahui bahwa keterlibatan anggota dalam kelompok cukup tinggi, hal ini terlihat dari hasil produksi kelompok yang terus dilakukan, walaupun keterlibatan mereka hanya sebatas pemasaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sangat tinggi, artinya walaupun dalam menyampaikan aspirasi mereka tidak bebas, mereka secara kelompok berusaha membebaskan diri dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Secara administrasi kelompok usaha ini juga rata-rata sudah mempunyai pembukuan, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Demikian juga pembagian hasil usaha, ketua kelompok mengatur pembagian hasil usaha, dimana terlihat dari hasil wawancara dengan Responden 2 dan 9 :

*".....kalau saya lihat KUBE-KUBE yang ada sekarang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kalau sekarang sudah ada pelatihan untuk pendamping dan KUBE, kemudian pembukuan KUBE mulai diterapkan, bahkan ketua kelompok dipilih berdasarkan kesepakatan bersama anggota, ada pembagian laba dan ada penambahan dana KUBE kalau KUBE tersebut berkembang...apalagi sekarang bantuannya sudah dalam bentuk cash transfer atau bantuan uang tunai....."*

Peran pendamping dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin dan sistem pembinaan kelompok usaha bersama. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa peran pendamping KUBE sangat menentukan dalam keberhasilan kelompok. Pendamping sebagai perpanjangan tangan dari dinas sosial provinsi merupakan ujung tombak dari keberhasilan program KUBE. Oleh sebab itulah sebelum bantuan disalurkan kepada kelompok, petugas yang akan mendampingi KUBE tersebut diberikan pembekalan atau pelatihan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan kelompok masyarakat miskin nanti mereka sudah punya pengetahuan dan pemahaman tentang KUBE. Responden 10 mengatakan:

*"...kita memang sudah mengikuti pelatihan pak, tapi kami gak tahu..bagaimana managemennya, sebelumnya diajari dulu cara membuat laporan dan apa saja yang menjadi tanggung jawab kami..kami bekerja ala kadarnya, datang ke lokasi ngobrol-ngobrol abis itu pulang, begitu.."*

Responden 5:

*"...waktu pelatihan pendamping sosial, materinya kurang sesuai dengan kebutuhan dilapangan, maksud saya bukan yang diinginkan...kita perlu keterampilan teknis atau cara-cara membuat laporan dll yang berkaitan dengan tugas kita dilapangan.."*

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai fasilitator kabupaten/kota mempunyai tugas membina KUBE-KUBE yang ada diwilayah mereka bekerjasama dengan dinas/instansi terkait lainnya. Pembinaan kelompok ini tidak hanya menjadi tanggungjawab provinsi sebagai pelaksana program, akan tetapi melibatkan dinas/instansi lain baik yang ada ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, sehingga keberadaan dan perkembangan KUBE dapat terbina



dengan baik dan sistem pembinaannya berjenjang. Hal ini diungkapkan oleh

Responden X1 dan X5 :

*".....kalau dinas sosial provinsi sebagai pemberi bantuan, maka sewajarnya dinas-dinas terkait baik ditingkat kab/kota maupun provinsi membantu membina kelompok-kelompok tadi, yang saya lihat kan tidak seperti itu, KUBE-KUBE tersebut berjalan apa adanya, tanpa adanya pembinaan dari instansi teknis terkait, sementara pendamping hanya sebatas memotivasi dan membantu pembukuan KUBE....."*

Responden X1:

*"...memang ada dunia usaha seperti PT. Timah Tbk, PT. Telkom menyalurkan program pemberdayaan masyarakat, hanya saya kurang tahu persis kelompok masyarakat mana yang diberdayakannya..."*

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dan kerjasama yang baik dalam membina kelompok-kelompok usaha ini, sehingga tidak heran bila salah satu penyebab gagalnya kelompok usaha ini disebabkan belum adanya pembinaan atau tindak lanjut yang sinergis dari semua instansi atau lembaga yang terkait.

### **G. Analisis Hasil Kuesioner Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama**

Kelompok usaha bersama yang menjadi kajian penulis dalam hal ini adalah kelompok usaha bersama yang produktif dan kelompok usaha bersama yang tidak produktif. Berdasarkan hasil kuesioner dan data lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rata-rata KUBE terbentuk tahun 2006 sebanyak 60,00 persen dan tahun 2007 sebanyak 20,00 persen serta tahun 2008 dan 2009 sebanyak 20,00

persen, artinya kalau dilihat dari tahun terbentuknya kelompok-kelompok tersebut sudah cukup lama terbentuk.

2. Jumlah anggota KUBE pada saat terbentuk rata-rata 5 (lima) orang sebanyak 52,00 persen, 7 (tujuh) orang 10,00 persen dan 10 (sepuluh) orang 38,00 persen. Proses terbentuknya banyak yang dibentuk oleh tenaga pendamping 40,00 persen, dibentuk dengan musyawarah anggota dan masyarakat sebanyak 40,00 persen, dibentuk oleh aparat desa (RT)/kelurahan 20,00 persen. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa KUBE-KUBE yang tidak aktif banyak yang dibentuk oleh pendamping KUBE, sehingga jelas keberadaan KUBE tersebut terbentuk secara mendadak, artinya ketika akan ada bantuan mereka segera membentuk kelompok usaha, sehingga KUBE-KUBE yang terbentuk secara dadakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam pembentukan kelompok kurang berjalan dengan baik.
3. Jenis usaha KUBE dan kecocokan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah atau tempat usaha. Rata-rata menjawab sesuai dengan jenis usaha dan kondisi wilayah sebanyak 75,00 persen dan tidak sesuai sebanyak 25,00 persen. Dengan tingkat keaktifan anggota rata-rata 75,00 persen aktif untuk KUBE yang anggotanya 5 orang dan 25,00 persen untuk KUBE yang anggotanya 10 orang. Alasan tidak aktif karena sudah pindah tempat tinggal 10,00 persen, karena sibuk dengan usaha lain 40,00 persen, karena kekurangan modal 30,00 persen dan karena tidak ada kemajuan atau perkembangan 20,00 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tersebut sudah direncanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka serta terlihat



adanya keaktifan mereka untuk bersama-sama membantu perkembangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kebebasan dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan apa yang akan mereka jalankan.

4. Pelatihan atau bimbingan yang diberikan kepada anggota kelompok sebelum bantuan diberikan, rata-rata menjawab tidak ada pelatihan sebanyak 65,00 persen sedangkan yang menjawab ada pelatihan sebanyak 35,00 persen, dengan bentuk pelatihannya berupa sosialisasi dan motivasi. yang dilaksanakan 1(satu) kali sebelum bantuan disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan sangat mereka perlukan baik terhadap kelompok-kelompok usaha maupun pendamping kelompok, sehingga proses pemberdayaan kelompok dan pendamping kurang berjalan dengan baik.
5. Pembukuan dan catatan keuangan KUBE rata-rata kelompok menjawab belum ada 85,00 persen dan yang menjawab sudah ada sebanyak 15,00 persen. Pembukuan dan keuangan dibuat oleh ketua KUBE 60,00 persen dan bendahara 40,00 persen, sedangkan rutinitas pertemuan anggota dalam sebulan rata-rata menjawab 1(satu) kali sebanyak 40,00 persen dan tidak ada menjawab 60,00 persen dengan alasan terlalu sibuk. Secara administrasi terlihat bahwa kelompok-kelompok yang ada belum memiliki administrasi yang baik bahkan terlihat sangat lemah dalam bidang administrasi termasuk para pendamping kelompok tersebut.
6. Masalah utama yang dihadapi KUBE adalah masalah pembukuan 35,00 persen, masalah pemasaran 30,00 persen, dan masalah bahan baku 35,00 persen., serta masalah modal 10,00 persen. Sedangkan cara penyelesaian masalah tersebut adalah dengan cara diselesaikan bersama anggota kelompok

sebanyak 45,00 persen, minta bantuan pendamping sebanyak 35,00 persen dan kerjasama dengan kelompok lain sebanyak 20,00 persen. Sebagaimana hasil analisis di atas, bahwa kelemahan kelompok terletak pada administrasi dan manajemen kelompok serta peran pendamping yang belum maksimal.

7. Peran pendamping dalam membantu masalah kelompok usaha bersama, rata-rata menjawab hanya sebatas memberikan motivasi 80,00 persen dan bimbingan 20,00 persen. Sedangkan intensitas pendampingannya rata-rata menjawab 1 (satu) kali sebulan sebanyak 70,00 persen, jarang atau tidak ada 10,00 persen dan kadang-kadang sebanyak 20,00 persen. Kemampuan pendamping memahami tugasnya sebagai pendamping sebanyak 75,00 persen dan tidak memahami sebanyak 25,00 persen. Sebenarnya keberhasilan kelompok salah satunya terletak pada peran serta dan ketangkasan manajemen serta *leadership* pendamping.
8. Kebermanfaatan KUBE dan usaha sendiri dalam mengelola bantuan yang diberikan rata-rata menjawab bermanfaat secara kelompok sebanyak 60,00 persen dan secara individu sebanyak 40,00 persen. Alasan berkelompok karena bantuannya skala besar, mudah memecahkan masalah, kerugian ditanggung bersama, adanya kebersamaan dan gotongroyong. Sedangkan alasan usaha sendiri lebih dikarenakan sulit menyatukan prinsip yang berbeda dan terlalu banyak orangnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut belum memahami maksud atau hakekat dibentuknya kelompok tersebut, hal ini wajar terungkap karena sosialisasi dan bimbingan terhadap kelompok sangat kurang.



9. Alasan ketidakterlibatan masyarakat miskin kedalam kelompok usaha bersama, lebih dikarenakan tidak tahu atau tidak mendapatkan informasi sebanyak 65,00 persen, karena alasan susah mengurus 10,00 persen, karena tidak ada yang membantu menguruskan 15,00 persen, tidak menjawab 10,00 persen.
10. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan terlihat bahwa masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE lebih meningkat pendapatannya dibandingkan dengan sebelum mereka tersentuh KUBE atau pernah tergabung dalam KUBE tetapi mengalami kegagalan. Berdasarkan data dari 50 responden KUBE yang dijadikan sampel rata-rata menjawab kehidupan ekonomi mereka meningkat cukup baik. Artinya dari segi pendapatan ekonomi mereka meningkat, akan tetapi dari segi keterlibatan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan kemampuan menjangkau sumber-sumber produktif yang lain belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari mulai proses pembentukan kelompok, bimbingan/pelatihan serta tidak adanya pemanfaatan sumber-sumber produktif lainnya dalam proses pemberdayaan mereka.

#### **H. Hasil Analisa Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama**

##### **1. Indikator Masukan (*input*)**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa masukan adalah faktor kunci yang digunakan sebagai input bagi berlangsungnya program pemberdayaan sosial masyarakat miskin dengan tolok ukur adanya kebijakan dan program (tersedianya pedoman atau acuan teknis), tersedianya sumber daya manusia

(SDM), tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang program serta yang lebih pokok adalah tersedianya anggaran atau dana yang memadai..

Menurut pandangan Hogwood dan Gunn (1993) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE sebagaimana yang dirumuskan dalam petunjuk teknis dan petunjuk operasionalnya secara detil disajikan sebagai panduan bagi pengelola program dan pelaksana di lapangan belum mampu diimplementasikan secara utuh dan substantif. Selain itu, setiap pengelola program diharuskan menyusun dan menetapkan POK dan ROK untuk dijadikan pedoman kerja.

## 2. Proses (*process*)

Analisis yang penulis lakukan dalam implementasi program tersebut adalah analisis proses yang merupakan serangkaian atau langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan selama program pemberdayaan sosial masyarakat miskin berlangsung dengan berpijak pada model implementasi George Edwar III. dengan tolok ukur komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Dari hasil wawancara dan observasi serta data lapangan yang penulis kumpulkan dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsisten yang diimplementasikan melalui sosialisasi program kepada masyarakat dunia usaha dan instansi terkait lainnya masih sangat kurang, apalagi pedoman umum (juklak/juknis) yang ada belum dijadikan sebagai acuan atau pedoman



dalam pelaksanaannya meskipun juklak/juknis sangat jelas. Sasaran atau target fisik tercapai sedangkan target waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan yang sudah dibuat. Kejelasan terhadap implementasi program tersebut terlihat juga bahwa para pelaksana program kurang paham akan program yang dijalankan. perbedaan pandangan dengan atasan sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator konsisten terhadap pelaksanaan program tersebut tidak ada. Orientasi program hanya pada target atau sasaran bukan pada tujuan program seperti yang tertuang dalam pedoman umum pelaksanaan program. Hierarki birokrasi juga mengakibatkan koordinasi menjadi kurang efektif, program terlaksana akan tetapi tujuan program yang diharapkan tidak tercapai dengan baik.

- b. Disposisi dengan indikator tanggungjawab, sikap, kepatuhan dan pemilihan staf termasuk insentif yang diimplementasikan dalam bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan program kurang, dimana koordinasi sesama pelaksana yang diberi tanggungjawab tidak berjalan secara efektif sesuai dengan kapasitas jabatan masing-masing. Artinya mereka mendukung namun tidak diikuti oleh sikap yang *eligible* atau dapat memahami dan memenuhi syarat keinginan dari pengambil keputusan atau pembuat program, sehingga kepatuhan atau loyalitas mereka terhadap atasan menjadi hilang apalagi perintah-perintah dan tanggungjawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik serta kurang tegasnya perintah atasan terhadap bawahannya. Adanya unsur kepentingan pribadi dan kelompok yang mendominasi, interpretasi terhadap program bersifat proyek oriented. Tingkah laku atau perspektif para pelaksana yang berbeda mengakibatkan pemahaman terhadap

program berbeda-beda pula apalagi besarnya pengaruh birokrasi dalam pelaksanaannya. Dari segi personel atau staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka terhadap program ini sangat kurang hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang belum sesuai serta kebanyakan mereka sebagai tenaga honorer yang belum memahami bidang tugas yang diamanatkan, sehingga dedikasi terhadap tugas sangat kurang, kemudian adanya pola pikir proyek oriented tadi sehingga mengartikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan diukur dengan uang walaupun mereka dalam pelaksanaannya telah mendapatkan insentif atau pendapatan yang sah dari pemerintah.

- c. Sumber daya dengan indikator staf yang terlibat dalam pengelolaan program secara kuantitas sangat kurang hanya berjumlah 8 (delapan) orang dengan sasaran lokasi di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Sedangkan secara kualitas masih sangat rendah dimana 50 persen dari pelaksana program yang terlibat adalah tenaga honorer yang tentunya berdampak pada efektivitas dan pemahaman mereka terhadap program sebab tenaga honorer tersebut tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengelolaan program, apalagi masih minim pengalaman. Jadi kecakapan staf yang ada sangat kurang, walaupun motivasi kerja mereka sangat baik. Sementara itu honor bagi mereka yang honorer sangat kecil serta tidak ada jaminan kerja, hal ini merupakan salah satu penyebab adanya pengabaian perintah dan tanggungjawab yang diamanatkan pada mereka banyak yang tertunda. Wewenang terhadap pelaksanaan program ini berada pada struktural eselonningnya atau jabatan struktural yang melekat pada pejabat tersebut, sehingga kewenangan ada pada atasan,



namun demikian karena adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang terlibat mengakibatkan kewenangan menjadi kabur, apalagi koordinasi tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa belum adanya pendidikan dan pelatihan bagi para pelaksana program serta tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kompetensi mereka. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaksana tentang program yang dijalankan mengakibatkan tanggungjawab secara sungguh-sungguh terhadap keberhasilan program tidak dapat dipenuhi, apalagi belum ada peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

- d. Struktur birokrasi dengan indikator pengawasan merupakan salah satu prosedur kerja dalam birokrasi. Pengawasan tidak dilakukan secara prosedural, keterlibatan kabupaten/kota sangat kurang serta tidak melibatkan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi hanya dilakukan sebagai formalitas prosedural, sehingga permasalahan yang sama muncul lagi di tahun-tahun berikutnya, sementara itu instansi/lembaga terkait tidak diikutkan dalam prosese pengawasan. Lemahnya tingkat koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga terkait merupakan salah satu faktor yang penyebab tujuan dari program ini tidak tercapai dengan baik. Pengentasan kemiskinan berjalan secara sendiri-sendiri. Penerapan standar operasional prosedur (*standard operational prosedures*) sebagai prosedur kerja yang telah dibuat tidak dijalankan dengan baik. Petunjuk operasional kegiatan tidak diimplementasikan secara utuh dan substantif. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009

standar pelayanan minimal sebagai patokan dalam melaksanakan setiap pelayanan bidang kesejahteraan sosial, walaupun dalam penerapannya kurang dipahami oleh pelaksana.

### 3. Indikator Keluaran (output)

Keluaran adalah hasil langsung yang diperoleh dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin, yang merupakan indikator hasil fisik dari pencapaian tujuan spesifik (*objective*). Indikator keluarannya adalah berapa banyak jumlah masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE yang dapat mandiri dan terpadu. Dari input program yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan kelompok-kelompok usaha bersama masyarakat miskin yang mandiri dan terpadu sesuai target yang telah ditentukan. Ripley dan Franklin (Winarno, 2007:145) menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) ini menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Indikator keluaran (*output*) dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin meliputi: jumlah sasaran KUBE yang berdaya dan mandiri, jumlah kelompok yang mampu mencapai tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka. Menurut data (dokumentasi) yang disampaikan oleh Informan 2 melalui wawancara:

“...karena kita belum sampai mengukur manfaat secara menyeluruh, jadi rasa-rasanya saya belum tahu berapa banyak yang sudah mandiri dan berkembang, laporan pun tidak ada dari para pendampingnya...”



Informan 1:

“...Saya rasa ada yang berkembang, cuma jumlah persisnya kurang tahu...pendamping tidak memberikan laporan kemajuan KUBE binaannya..lagian susah untuk melihat atau mengukur mandiri atau tidaknya..bisa jadi karena usaha lain diluar bantuan dari kita..”

Responden.3. :

“...untuk nambah-nambah belanja dapur lumayan lah..dak tau ya apa maju atau tidak usaha ini..dulu saya dibantu bahan-bahan dan perlengkapan buat kue, alhamdulillah sampai sekarang masih ada..”

Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. **Fasilitator**, Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. **Perwakilan masyarakat**, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pendamping sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. **Peran-peran teknis**, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan’ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok,

menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pendamping sosial diterangkan bahwa mereka melaksanakan tugas dan perannya belum sampai pada peran-peran yang strategis, tapi baru sebatas memotivasi dan mengarahkan agar bantuan yang diberikan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Secara teknis, kemampuan para pendamping sosial masih perlu dikembangkan dan diberdayakan ke arah peningkatan kemampuan petugas (*capacity building*) yang aplikatif dan praktis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendampingannya.

#### 4. Hasil atau Manfaat (*outcomes*)

Hasil atau manfaat yang diharapkan yaitu akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu investasi program, dan umumnya dalam jangka waktu lebih lama dari manfaat langsung dan indikator pencapaian tujuan umum, seperti meningkatnya kemandirian masyarakat miskin dan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk pengukuran hasil yang dirasakan belum dapat dilakukan, karena program yang telah dijalankan baru sebatas mengejar target atau sasaran, namun demikian hasil yang diinginkan dari program ini sebenarnya secara kualitas sudah menunjukkan penilaian adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka, adanya penyerapan tenaga kerja dan lapangan kerja baru. Namun secara kuantitas masih sulit diukur. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat penulis sederhanakan berdasarkan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:



Tabel 4.9  
Ditinjau Dari Indikator Masukan (*input*)

NO	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	<p><b>Masukan (<i>input</i>):</b></p> <p>a. Tersedianya program (ada pedoman atau Juklak/teknis)</p> <p>b. Tersedianya SDM</p> <p>c. Tersedianya anggaran</p> <p>d. Sarana dan Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juknis/Petunjuk Operasional sudah ada tapi dalam implementasinya belum maksimal dilaksanakan</li> <li>Belum disinergikan &amp; diberdayakan;</li> <li>Anggaran yang ada belum memadai</li> <li>Belum dimanfaatkan secara maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola program masih rendah untuk memahami, mempelajari &amp; mengikuti petunjuk yang ada;</li> <li>Instansi terkait belum melakukan sinergisitas dan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat miskin</li> <li>Pengelola program dan masyarakat tidak jeli melihat potensi lokal.</li> <li>Pendamping sosial tidak dibekali dengan pengetahuan dasar pekerjaan sosial dan tidak adanya pelatihan khusus pendampingan</li> <li>APBD rendah</li> <li>Kurangnya kompetensi SDM pengelola program</li> </ul>

Tabel 4.10 ditinjau dari Proses (*process*)

2.	<p><b>Proses (<i>process</i>)</b></p> <p>a. (Komunikasi) Transmisi, Kejelasan &amp; Konsisten</p> <p>b. (Disposisi) Kecendrungan pelaksana program</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi program tidak dilakukan sesuai juknis, petunjuk pelaksana jelas, hierarki birokrasi.</li> <li>Dukungan terhadap program kurang, tingkah laku/perspektif para</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelola program belum membangun komunikasi dan kemitraan dengan stakeholders lainnya, tidak memahami</li> </ul>
----	--	--	--

	<p>c. (SDM) Staf pelaksana, fasilitas, wewenang dan informasi</p> <p>d.( Struktur birokrasi) Prosedur atau aturan, Fragmentasi</p>	<p>pelaksana berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya SDM secara kuantitas/kualitas, eselonning, kebutuhan sasaran tidak diikuti dengan kesesuaian antara kebutuhan dengan masalahnya;</li> <li>• Kesesuaian dengan struktur birokrasi, pengawasan/monitoring belum optimal, standar prosedur minim, hubungan kerja dengan potensi lokal terbatas</li> </ul>	<p>program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang kurang, rendahnya loyalitas, kepentingan pribadi/kelompok.</li> <li>• Rendahnya kompetensi para pelaksana, belum adanya ikatan kerja, adanya kepentingan pribadi/kelompok.</li> <li>• k. Belum adanya SOP, Lemahnya koordinasi,</li> </ul>
--	--	---	--

Tabel 4.11 ditinjau dari Keluaran (*output*)

3.	<p><b>Keluaran (<i>output</i>)</b> Jumlah KUBE yang mandiri dan terpadu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola program tidak seluruhnya mengetahui berapa banyak kube-kube fakir miskin yang sudah diberdayakan dan berhasil, hanya secara umum diketahui jumlah sasaran yang menerima bantuan/dilayani, tapi bukan masuk kategori dimandiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya laporan dari petugas dan pendamping sosial dan tidak dilaksanakan pembinaan lanjutan kepada kube yang telah memperoleh bantuan &amp; bimbingan;</li> </ul>
----	--	--	--

Tabel 4.12. ditinjau dari Manfaat (*outcomes*)

4.	<p><b>Hasil (<i>outcomes</i>)</b></p> <p>a. Kemiskinan menurun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola program tidak memiliki data pasti berapa banyak kube yang berkembang, mandiri dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, belum terlihat data yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena program hanya mengejar target/sasaran serta tidak adanya laporan perkembangan KUBE.</li> </ul>
----	--	--	--



		pasti.	
	<p>b. Jumlah KUBE yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan sosialnya.</p> <p>c. Penyerapan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan interaksi baik internal maupun dengan lingkungan sosialnya berlangsung cukup harmonis, tidak banyak ditemukan hambatan;</li> <li>• Partisipasi anggota KUBE dalam aktifitas sosial tetap berlangsung apalagi pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan;</li> <li>• Tidak ada data konkret, hanya secara tidak langsung dalam konteks dunia usaha ada beberapa dunia usaha yang melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar lokasi tempat usahanya.</li> <li>• Secara kuantitas memang sulit diukur, akan tetapi terbentuknya kelompok-kelompok usaha baru secara tidak langsung akan membuka peluang kerja baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai sosial dan budaya lokal yang masih kuat;</li> <li>• Adanya ikatan emosi sesama anggota KUBE, dan masih kuat budaya tolong menolong.</li> <li>• Adanya tuntutan bagi dunia usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana amanat UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang memuat pasal tentang CSR dunia usaha.</li> <li>• Adanya kelanjutan program KUBE dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLPS)</li> </ul>





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat atau hasil dari program tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa program ini secara garis besar dapat membantu kelompok usaha bersama dalam meningkatkan pendapatan mereka walaupun secara kuantitas belum bisa di ukur sejauhmana tingkat kemiskinan mereka berkurang, namun hasil menunjukkan penilaian adanya peningkatan ekonomi dan terbentuknya interaksi sosial antar kelompok. Sedangkan bagi pengelola program ini menunjukkan buruknya tata kelola program dan koordinasi yang dilakukan.
  - b. Secara umum tujuan utama dari program ini belum tercapai yaitu mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru dan menyerap pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini belum memberikan manfaat yang signifikan.
2. Tingkat keberhasilan program sesuai hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan program ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu, sebagai berikut:
  - a. Dilihat dari aspek pengelolanya, implementasi program tersebut belum berjalan dengan baik, dimana indikator atau ciri pemberdayaan

sebagaimana yang dinyatakan dalam teori Hasenfeld bahwa akses terhadap sumber-sumber produktif belum memadai, Partisipasi dan aspirasi mereka baik secara individu maupun kelompok belum terakomodir dengan baik, keterlibatan kelompok dalam hal perencanaan tidak dilibatkan, walaupun secara aktif mereka mempunyai kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Sementara hasil kajian terhadap implementasinya menunjukkan bahwa proses komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik, banyak menunjukkan kelemahan-kelemahan dari segi pengelolaan program tersebut.

- b. Dilihat dari aspek penerima program, banyaknya kelompok-kelompok usaha bersama yang terbentuk belum menunjukkan hasil yang signifikan, artinya dari bantuan yang telah disalurkan tidak diketahui berapa persentase angka kemiskinan menurun, lapangan kerja baru terbuka, pengangguran terserap dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama di Kota Pangkalpinang dilihat dari dua aspek tersebut belum menunjukkan keberhasilan.
3. Efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dari hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut.



- a. Program yang dilaksanakan baru sebatas tingkat outputnya saja bukan sampai pada tingkat outcomenya, sehingga tujuan dari program tidak tercapai.
- b. Belum ada data yang menunjukkan persentase keberhasilan KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dari sekian dana bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama tersebut.
- c. Pola pengelolaan program belum maksimal walaupun program yang diluncurkan sangat bagus, namun tata kelola program masih sangat buruk. Sehingga disimpulkan bahwa program yang telah dilaksanakan tersebut secara umum kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kota Pangkalpinang, hal ini lebih disebabkan pada tataran implementasi dan tata kelola program

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, penulis sarankan sebagai berikut:

1. Program yang telah dilaksanakan perlu lebih dititik beratkan pada tingkat *outcome* (manfaat) bukan hanya mengejar *output* saja, serta harus berdampak (*impact*) luas pada masyarakat miskin lainnya, seperti program adopsi desa miskin. Dimana bukan hanya masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok usaha saja yang menjadi sasaran program, tetapi masyarakat yang tidak tergabung dalam usaha juga terkena dampak dari program tersebut.

2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan secara terpadu dan sistematis, sehingga dapat diketahui manfaat dan tingkat keberhasilan serta efektivitas program tersebut.
3. Perlu peningkatan kerjasama antar instansi/lembaga terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas program tersebut, sehingga pola-pola pengembangan KUBE terpadu dapat terwujud .

UNIVERSITAS TERBUKA





## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R.I. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: FE.Ul.
- Abidin, S.Z. (2006). *Kebijakan Pelayanan Publik dalam Suara Bebas Jakarta*, III(I), 45-46.
- Alqadrie, I.S. (1993). *Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial*. Pontianak: Jurnal UNTAN, Vol.III.(23)
- Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Pangkalpinang Dalam Angka*. Pangkalpinang: BPS
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Sosial RI. (2008). *Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial press.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2009). *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Departemen Sosial RI.
- Dye, R.T. (1972). *Understanding Pubik Policy*. New Jersey: Prentice Hall, inc.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternative Vision, Analysis and Pratices*. Australia: Longman.
- Irawan, P. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*, MAPU.5103. Jakarta: UT.
- Irianto, L.B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Untuk Apa?*. Jakarta: UT. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Kismartini, Irianto, L.B. & Suwitri, S. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*, MAPU.5301. Jakarta: UT.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, H (2004). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.



- Nugroho, R. (2009). *Public Polic.*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (1997). *Public Policy : An Intoduction o the theory and practice of Policy Analysis.* UK.Lyme. US: Edward Elgar. Cheltenham.
- Patton, Q. M. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*, (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pranaka dan Vidyandika M. (1996). *Pemberdayaan.* Jakarta: CSIS.
- Pusat Penyuluhan Sosial. Depsos R.I. (2009). *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat.* Jakarta: Departemen Sosial R.I
- Sabatier, P.A & Mazmanian, D. A. (1987). *Implementai on and Public Policy.* University of California. Al Davis. Scott Foresman and Company.
- Sahdan, G. (2008). *Penanggulangan Kemiskinan.* Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Sekretariat Tim Pengendalian PNPM Mandiri.(2010). *Tentang PNPM Mandiri.* Diambil 11 Maret 2010, dari situs World Wide Web [http:// www.pnpn.mandiri](http://www.pnpn.mandiri).
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Jakarta: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Biro Hukum Depsos RI.
- Wahab, A. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (1999). *Analisa Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya.* Malang: PT. Danar Wijaya.

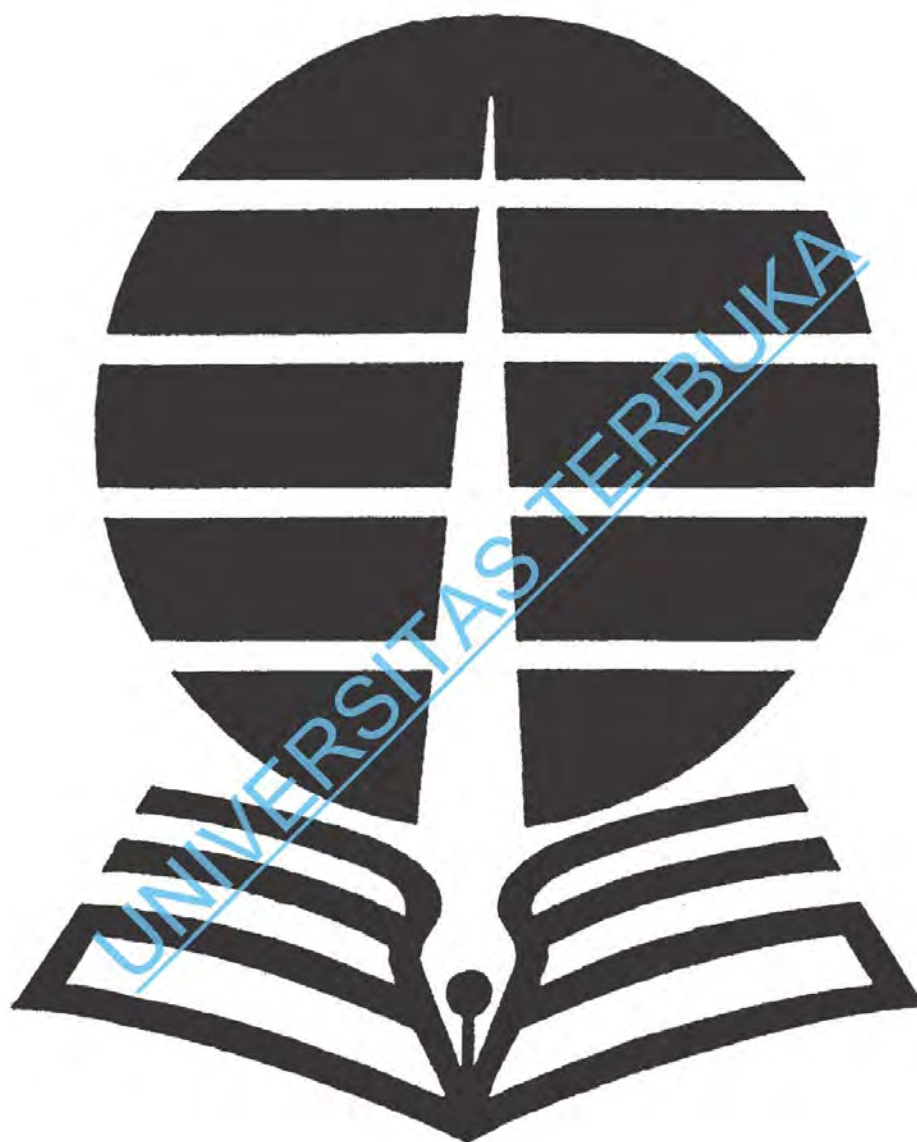
Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wikipedia. (2004). *Potret Kemiskinan Masyarakat Indonesia*, Diambil 12 Mei 2009, dari Situs Wold Wide Web [http://id.wikipedia.org/kemiskinan di Indonesia](http://id.wikipedia.org/kemiskinan%20di%20Indonesia)

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

UNIVERSITAS TERBUKA





**DAFTAR NAMA- NAMA INFORMAN  
INSTANSI / DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	SYAMSUMI SALEH,SE Pembina Utama Muda/IV.C NIP.19540109 198203 1 005	KEPALA DINAS	INFORMAN KUNCI
2	ASNAWI, SH Pembina/ IV.A NIP.19581007 197803 1 010	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	INFORMAN .1
3	HARYADI SAHARI,S.SOS Penata/III.C NIP.19721202 200212 1 003	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	INFORMAN.2
4	NUSATION, A.Ks Penata/III.C NIP19710810 200212 1 002	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PROGRAM	INFORMAN 3
5	ASWIN, S.SOS Penata/III.C NIP.19680419 200212 1 002	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	INFORMAN 4
6	RUDI ARYANTO Pengatur Tk.I/ II.A NIP.19711206 200701 1 003	STAF PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	INFORMAN 5
7	SUSI PRAMONI NIP-	STAF HONORER PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	INFORMAN 6
8	FITRIYANSYAH, SE NIP.-	STAF HONORER PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	INFORMAN 7

**DAFTAR NAMA- NAMA RESPONDEN  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PRODUKTIF/BERKEMBANG  
DI KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DARI TAHUN 2006 - 2010**

NO	NAMA KETUA KUBE	ALAMAT KUBE	JENIS USAHA	KET.
1	Robani	Rt.01,Rw.03 Kelurahan Ketapang Kec. Pangkal Balam. Pangkalpinang	Pembuat Kue	Responden.1
2	Herman Toni	Rt.01,Rw.03 Kelurahan Ketapang Kec. Pangkal Balam. Pangkalpinang	Percetakan Batako	Responden.2
3	Arifin	Jl. RE.Mardinata Rt. 01 Rw. 01 Kel. Ampui Kec. PangkalBalam	Nelayan	Responden.3
4	Salbani	Rt.1.Rw.01 Kel. Ampui. Kec.Pangkal Balam Pangkalpinang	Nelayan	Responden.4
5	Eddy Amin	Rt.02.Rw.01 Kel.Selindung Baru Kec.Pangkal Balam.Pangkalpinang	Nelayan	Responden.5
6	Effendi	Rt.02, Rw.03 Kel.Selindung Baru Kec.Pangkal Balam.Pangkalpinang	Pertukangan	Responden.6
7	Susanto	Rt.05, Rw.03 Kel.Gabek.I Kec.Pangkal Balam. Pangkalpinang	Nelayan	Responden.7
8	Basri	Jl. Fatmawati Rt. 06 rw. 03 kel.Gabek I Kec. Pangkal Balam	Ternak Ayam Potong	Responden.8
9	M. Yunus Bunas	Jl. Kerisi Rt. 01 Rw. 03 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam	Percetakan Batako	Responden.9
10	Choidir	Jl. Kerisi Rt. 01 Rw. 03 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam	Warung Mie	Responden. 10
11	Muhammad Syatah	Jl. Nyataoh Rt. 07 Rw. 02 Kel. Bukit sari Kec. Gerunggung	Kerupuk Ikan	Responden. 11
12	E. Sutisna	Jl.Nyataoh Rt. 07 rw. 03 Kel. Bukit sari Kec. Gerunggung	Kerupuk/Get es	Responden. 12



13	Muhammad Sadri	Rt. 01 Rw. 01 Kel Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang	Pembuat Kue Kering	Responden. 13
14	Masni	Kel. Tua Tunu Indah kec. Gerunggang	Percetakan Batako	Responden. 14
15	M. Sarmadi	Rt. 09 Rw. 03 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang	Kemplang Bakar	Responden. 15
16	Jasima	Rt. 09 Rw. 03 No. 183 Kel. Kacang Pedang Kec. gerunggang	Kerupuk Ikan	Responden. 16
17	Kawi Marzuki	Jl. Angsana V Rt. 07 Rw. 03 No 70 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang	Warung Bakso	Responden. 17
18	Rudi	Jl. Kampung melayu Rt. 02 Rw. 01 No. 33 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang	Bengkel Las	Responden. 18
19	Imam setiady	Jl. Delima I Rt. 11 Rw. 03 No. 285 Kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang	Sablon	Responden. 19
20	Yohana yusuf	Gang Mantri Urip dalam Rt.01 Rw 01 kel.Tamanbunga kec.Gerunggang	Pembuat Kue	Responden. 20
21	Masni ibrohim	Kec.gerunggang tua tunu indah Rt.01/01	Pertanian	Responden. 21
22	M..sadri	Tua tunu indah, Rt.01/01 kec.gerunggang	Pertanian	Responden. 22
23	Ruminah	Kel. Bukit merapin ,Jl.Tua tunu Raya/ gang.Bakti, Rt 06/02	Bengkel	Responden. 23
24	Tuti Arun	Jl. Gg. Jambu Rt.02/01 Kel. Bukit merapin Kec. Gerunggang	Pembuat Kue	Responden. 24
25	Nano Piana	Jl. Bukit Merapin Rt.02/01 kel Bukit Merapin Kec. Gerunggang	Ternak Lele	Responden. 25
26	Solmah	Jl. Kampung melayu Rt.02/01 kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang	Warung Bakso	Responden. 26
27	Suhana Yusuf	Gg. Bonsai kel. Taman Bunga Kec. Gerunggang	Pembuat Kerupuk	Responden. 27
28	Lim tjlt Sen	Gg. Mantri urip Dalam rt.01/01 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang	Pembuat Keripik Tahu	Responden. 28

29	Rodipah	gg. mangga Rt.01/03 kel. Kp Kejaksanaan Kec. Gerunggang	Kemplang	Responden. 29
30	Thomas Kap	Jl. A.Yani Gg. Kemas Adil Rt. 01/03 Kel. Kp Kejaksanaan Kec. Gerunggang	Pertukangan	Responden. 30
31	M. satah	Jl. Bukit Nyatoh Rt 07/02 Kel Bukit sari kec Gerunggang	Ternak Ayam Potong	Responden. 31
32	Susi Martini	Jl. Usman ambon No. 01 Rt. 03/01 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang	Warung Makanan	Responden. 32
33	Syacharial	Jl. Sumedang Rt 02/01 Kel. Kacang pedang kec. Gerunggang	Percetakan Batako	Responden. 33
34	Syariyanto	Jl. Usman Ambon 186 Rt. 04/01 Kerl. Kacang pedang kec. Gerunggang	Kerupuk	Responden. 34
35	Sulastri	Jl. Gg. Sri gunting rt. 04/02 Kel. Kacang pedang kec. Gerunggang	Makanan Ringan	Responden. 35
36	Abu Bakar	Komp Kurma no 35 Rt. 06/02 kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang	Ternak Ayam Potong	Responden. 36
37	Idris ruzi	Jl. Gurani I Rt 06/03 Kel gabek I kec. Pangkal balam	Nelayan Kepiting	Responden. 37
38	Basri	Rt. 06/03 kel. Gabek I Kec. Pangkal balam	Nelayan	Responden. 38
39	Susanto	Gg. Rawa No 230 rt. 01/03 kel Gabek I Kec Pangkal Balam	Nelayan	Responden. 39
40	Sah i Ramadhan	Jl. Jend Sudirman Rt. 03/02 kel Gabek I Kec. Pangkalbalam	Cetak Batako	Responden. 40
41	Abdullah	Jl. Fatmawati Rt. 06/03 Kel gabek I Kec. Pangkal balam	Tambak udang	Responden. 41
42	Amrillah	Jl. Jend Sudirman Rt. 01 No. 03 Kel.gabek I Kec. Pangkal balam	Bengkel Las	Responden. 42
43	Arfani	Jl. Yos Sudarso V Rt. 01/01 Kel. Gabek II Kec. Pangkal balam	Bengkel Motor	Responden. 43
44	Suhaili	Gg. Kenari Rt. 02/02 kel. Gabek II Kec. Pangkal balam	Ternak Itik	Responden. 44



45	Putra jaka Kelana	Gg. Telaga Putih Jl. Jagung rt. 02/03 Kel Selindung Baru Kec. Pangkal balam	Tambak Ikan	Responden. 45
46	Eddy Amin	Gg. Telaga Putih Rt. 02/02 Kel. Selindung baru Kec. Pangkal balam	Cetak batako	Responden. 46
47	Effendi	Jl. Jagung dalam Rt. 02/03 Kel selindung baru Kec. Pangkal balam	Nelayan	Responden. 47
48	Arifin Hasan	Jl RE. Martadinata Rt. 01/01 Kel Ampui Kec. Pangkal Balam	Nelayan	Responden. 48
49	Suherman	Rt. 01/03 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam	Pembuat Terasi	Responden 49
50	Azahniar	Rt. 02/03 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam	Kerupuk /Getes	Responden. 50

UNIVERSITAS TERBUKA



**DAFTAR NAMA- NAMA RESPONDEN  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) YANG TIDAK PRODUKTIF  
DI KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG DARI TAHUN 2006 - 2010**

<b>NO</b>	<b>KETUA KUBE</b>	<b>ALAMAT KUBE</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>KET.</b>
1	Renaldi Ilham	Jl. Demang Singayuda Rt. 03/02 Kel. Bukit Besar Kec. Bukit Intan	Sablon	Responden. X1
2	Yoni Sapriyanto	Rt. 03/01 Kel. Parit lalang kec. Rangkui	Ternak Ayam	Responden. X2
3	Muhammad Ulung	Gg. Rambutan Rt. 03/01 Kel. Kacang pedang Kec. Gerunggang	Percetak an Batako	Responden. X3
4	Wirman	Rt. 01/03 Kel. Lontong pancur Kec. Pangkal Balam	Percetak an Batako	Responden. X4
5	Muhammad yamin	Jl. Teratai Term sebrang Kel. Gedung Nasional Kec. Taman sati	Bengkel	Responden. X5

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN  
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA  
DI KOTA PANGKALPINANG**

RESPONDEN : PENGURUS KUBE

- 1 Kapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bapak/Ibu terbentuk ?  
 a. Tahun 2006      b. Tahun 2007      c. Tahun 2008      d. Tahun 2009      e.....
- 2 Berapa jumlah anggota KUBE Bapak/Ibu awal pembentukan ?  
 a. 5 Orang      b. 7 Orang      c. 8 Orang      d. 10 Orang      e.....
- 3 Bagaimana proses pembentukan KUBE ?  
 a. Dibentuk oleh Dinas Sosial  
 b. Dilakukan oleh aparat Desa/Kelurahan  
 c. Dibentuk dengan musyawarah anggota dan masyarakat  
 d. Dibentuk oleh Tenaga Pendamping  
 e.....
- 4 Apa jenis usaha KUBE Bapak/Ibu ?  
 a. Pertanian      b. Pertukangan      c. Percetakan      d. Perbengkelan      e.....
- 5 Menurut Bapak/Ibu usaha apa yang paling cocok dilaksanakan di daerah ini ?  
 a. Peternakan      b. Pertanian      c. Perikanan      d. Perbengkelan      e.....
- 6 Berapa orang anggota KUBE Bapak/Ibu yang masih aktif ?  
 a. 5 Orang      b. 3 Orang      c. 8 Orang      d. Tidak Aktif Semua      e.....
- 7 Mengapa mereka tidak aktif ?  
 a. Karena sibuk dengan usaha lain  
 b. Karena sudah pindah tempat tinggal  
 c. Karena kekurangan modal  
 d. Karena tidak ada perkembangan atau tidak maju  
 e.....
- 8 Apakah Bapak/Ibu dan anggota KUBE lainnya mempunyai usaha lain disamping usaha kelompok ini ?  
 a. Ada      b. Tidak ada
- 9 Jika ada, apa bidang usaha tersebut ?  
 a. Pertokoan      b. Jual beli barang      c. Tambang Inkonvensional  
 d. Pengumpul barang bekas      e.....
- 10 Sebelum Bapak/Ibu menjalankan usah kelompok ini, apakah Bapak/Ibu diberikan pelatihan atau bimbingan terlebih dahulu ?  
 a. Ya      b. Tidak
- 11 Jika Ya, apa bentuk pelatihannya ?  
 a. Sosialisasi      b. Bimbingan teknis      c. Motivasi      d. Bimbingan usaha      e.....
- 12 Apakah pelatihan yang diberikan tersebut sesuai dengan bidang usaha kelompok ?  
 a. Sesuai      b. Tidak Sesuai
- 13 Jika tidak sesuai, apa alasannya ?

- a. Karena terlalu banyak teori  
 b. Materi yang diberikan tidak sesuai  
 c. Karena tidak sesuai dengan keinginan kelompok  
 d. Karena tidak sesuai dengan teknis di lapangan  
 e.....
- 14 Berapa kali Bapak/Ibu mendapatkan pelatihan atau bimbingan sebelum bantuan disalurkan ?  
 a. 1 kali                      b. 2 kali                      c. 3 kali                      d. 4 kali                      e.....
- 15 Apakah Bapak/Ibu ikut juga dalam program pemberdayaan masyarakat yang lain, seperti PNPM Mandiri, P2KP atau PEMP ?  
 a. Tidak                      b. Ya
- 16 Apakah KUBE Bapak/Ibu sudah mempunyai pembukuan dan catatan keuangan ?  
 a. Belum ada                      b. Sudah ada
- 17 Siapa yang mengatur atau membuat pembukuan dan keuangan KUBE ?  
 a. Ketua                      b. Sekretaris                      c. Bendahara                      d. Pendamping                      e.....
- 18 Apakah ada pertemuan setiap anggota KUBE ?  
 a. Ya                      b. Tidak ada
- 19 Jika ada, berapa kali dalam sebulan ?  
 a. 1 minggu sekali                      b. 2 minggu sekali                      c. 1 bulan sekali                      d. 3 minggu sekali                      e.....
- 20 Jika tidak ada, apa alasannya ?  
 a. Terlalu sibuk                      b. Tidak ada biaya                      c. Tidak efektif  
 d. Tidak ada yang mengatur                      e.....
- 21 Apa masalah utama yang dihadapi KUBE Bapak/Ibu ?  
 a. Masalah pemasaran                      b. Masalah bahan baku                      c. Masalah kemasan/bungkusan  
 d. Masalah pembukuan                      e.....
- 22 Bagaimana Bapak/Ibu menyelesaikan masalah tersebut ?  
 a. Minta bantuan Dinas Sosial setempat  
 b. Diselesaikan bersama kelompok  
 c. Minta bantuan pendamping  
 d. Kerjasama dengan kelompok lain  
 e.....
- 23 Bagaimana pembagian hasil dari usaha kelompok tersebut ?  
 a. Disesuaikan dengan jumlah anggota yang aktif  
 b. Disamakan semua anggota  
 c. Disesuaikan dengan usaha masing-masing  
 d. Sebagian dibagikan sebagian ditabungkan  
 e.....
- 24 Siapa yang membagikan hasil usaha ?  
 a. Ketua                      b. Pendamping                      c. Bendahara                      d. Dinas Sosial                      e.....
- 25 Apakah pendamping KUBE sering berkunjung ketempat KUBE Bapak/Ibu ?  
 a. Tidak pernah                      b. 1 kali seminggu                      c. 1 kali sebulan                      d. Tiap hari                      e.....
- 26 Apa yang dilakukan pendamping jika berkunjung pada KUBE Bapak/Ibu ?  
 a. Motivasi                      b. Bimbingan                      c. Melihat pembukuan  
 d. Ikut kerja                      e.....
- 27 Menurut Bapak/Ibu apakah pendamping membantu menyelesaikan masalah KUBE yang dihadapi kelompok Bapak/Ibu ?  
 a. Tidak pernah                      b. Sering                      c. Kadang-kadang  
 d. Hanya sekali                      e.....



28 Menurut Bapak/Ibu apakah pendamping memahami tugasnya sebagai pendamping ?

- a. Ya
- b. Tidak

29 Menurut Bapak/Ibu apakah kelompok usaha ini memberikan manfaat bagi Bapak/Ibu ?

- a. Ya
- b. Tidak

30 Jika tidak, mengapa ?

- a. Karena susah pembagian hasilnya
- b. Karena susah menyatukan prinsip yang berbeda
- c. Karena banyak waktu terbuang
- d. Karena biaya operasional lebih besar
- e. ....

UNIVERSITAS TERBUKA

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>
--------------------------

NO.	IDENTITAS MAHASISWA		
1.	NAMA	:	HARYADI
2.	NIM	:	015535602
3.	ALAMAT	:	JL.GANDARIA.I,RT.07/03,KACANGPEDANG,GERUNG GANG
			PANGKALPINANG. PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
4.	PROGRAM	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP) UNIV. TERBUKA
5.	JUDUL TESIS	:	“EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KOTA PANGKALPINANG “

NO.	IDENTITAS RESPONDEN		
1.	NAMA	:	
2.	UMUR	:	
3.	PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
4.	PANGKAT/GOL	:	
5.	ALAMAT	:	
6.	JENIS KELAMIN	:	
7.	JABATAN	:	
8.	KETERANGAN LAINNYA	:	

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2010

- I. RESPONDEN : (Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, Kepala Seksi Monitoring/Evaluasi, Kepala Seksi Perencanaan Program dan Staf Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin)

NO.	PERTANYAAN
<b>A.</b>	<b>IMPLEMENTASI PROGRAM</b>
	<b>a. Komunikasi</b>
1.	Apakah ada pedoman umum/petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin tersebut ? Jawaban:
2.	Apakah juklak/juknis tersebut sudah jelas dan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan ? Bagaimana pelaksanaannya ? Jawaban:
3.	Apakah para pelaksana program tersebut mengerti dan paham terhadap program yang akan para pelaksana tersebut jalankan ? Jawaban:
4.	Kapan program tersebut harus dilaksanakan, Siapa yang akan melaksanakan program tersebut, siapa yang menjadi sasaran nya ? Jawaban:
5.	Apakah para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagaimana perintah atau petunjuk atasan terhadap pelaksanaan program tersebut ? Jawaban:
6.	Bagaimana bentuk pelaksanaan program. Sarana atau media apa yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut ? Jawaban:
7.	Apakah para pelaksana mengetahui tujuan dari program tersebut dan kepada siapa program tersebut ditujukan? Jawaban:
	<b>b. Disposisi</b>
8.	Bagaimana personel atau staf yang melaksanakan program tersebut. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang diatur atau yang diinginkan dalam juklak/juknis atau organisasi ? Jawab
9.	Bagaimana perintah-perintah atasan diikuti oleh para pelaksana program ?



	Jawaban:
10.	Bagaimana pengaruh birokrasi terhadap para pelaksana program ?
	Jawaban:
11.	Apakah ada kebijakan tertentu dari atasan terhadap program tersebut ? Bagaimana sikap staf terhadap kebijakan tersebut ?
	Jawaban:
12.	Bagaimana unsur kepentingan terlibat dalam pelaksanaan program tersebut ?
	Jawaban:
13.	Sejauhmana tanggungjawab para pelaksana terhadap program ini, mulai dari staf pelaksana sampai kepala dinas ?
	Jawaban:
14.	<b>c. Sumber Daya</b> Apakah staf atau pelaksana program tersebut mendapatkan insentif atau honor yang memadai dari program yang mereka laksanakan ? Bagaimana bentuk insentifnya ?
	Jawaban:
15.	Berapa jumlah staf yang melaksanakan program tersebut ?
	Jawab :
16.	Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program tersebut ?
	Jawaban:
17.	Apakah ada diklat atau keahlian khusus bagi staf atau pelaksana program yang akan melaksanakan program tersebut?
	Jawaban:
18.	Apakah ada bidang/ seksi atau bagian tertentu yang menangani program pemberdayaan masyarakat miskin ? Bagaimana kewenangannya ?
	Jawaban:
19.	Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam menjalankan program tersebut ?
	Jawaban:
20.	Apakah pelaksanaan program ini terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi para pelaksana ?
	Jawaban:

21	Bagaimana perintah-perintah pelaksanaan diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten oleh para pelaksana program ?
	Jawaban:
22	Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut ? termasuk pemanfaatan informasi yang berhubungan dengan program ?
	Jawab
23	<b>d. Struktur Birokrasi</b> Bagaimana proses pengawasan/monitoring terhadap program tersebut ?
	Jawaban:
24	Siapa yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi (pengawasan) terhadap program tersebut ?
	Jawaban:
25	Bagaimana koordinasi yang dilakukan ? apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam koordinasi antar lembaga/instansi lain ?
	Jawaban:
26	Sejauhmana keterlibatan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan program tersebut ?
	Jawaban:
27	Bagaimana Standar Operasional Prosedur/SOP dalam pelaksanaan program tersebut ?
	Jawaban:
28	Apakah hambatan atau kendala dalam pelaksanaan SOP tersebut ?
	Jawaban:
<b>B</b>	<b>PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
29	Bagaimana proses pembentukan kelompok (KUBE) tersebut ?
	Jawab
30	Bagaimana keterlibatan anggota dalam kelompok tersebut ?
	Jawaban:
31	Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam kelompok?
	Jawaban:
32	Apa bentuk keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat miskin ?
	Jawaban:
33	Apakah masyarakat/kelompok tertentu/dunia usaha dilibatkan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat miskin?



	Bagaimana sistem pembinaan kelompok tersebut ?
	Jawab
<b>C.</b>	<b>KEMISKINAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN</b>
34	Apakah yang menjadi dasar dalam menentukan kelompok masyarakat miskin ini ? Jawaban.
35	Bagaimana kriteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan usaha kelompok ini ? Jawaban:
36	Apakah ada dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? Jawaban:
37	Apakah data masyarakat miskin yang digunakan bersumber dari data BPS atau data Depsos RI ? Jawab
38	Menurut PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kessos bagi fakir miskin, bahwa yang menjadi sasaran pelayanan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin adalah yang mengacu pada PP tersebut .Bagaimana implementasinya ? Jawab
39	Bagaimana dengan sumber pendapatannya (pendapatan pokok, tambahan/penunjang) ? apakah menjadi ukuran ? Jawaban
40	Bagaimana juga dengan tingkat pendapatannya ? (perkapita/th atau perkg/th) Jawab



## PEDOMAN WAWANCARA

O.		IDENTITAS MAHASISWA	
1.	NAMA	:	HARYADI
2.	NIM	:	015535602
3.	ALAMAT	:	JL.GANDARIA.I,RT.07/03,KACANGPEDANG,GERUNG GGANG PANGKALPINANG
4.	PROGRAM	:	MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP) UNIV. TERBUKA
5.	JUDUL TESIS	:	“ EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KOTA PANGKALPINANG ”
NO.		IDENTITAS RESPONDEN	
1.	NAMA	:	
2.	UMUR	:	
3.	PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
4.	NAMA KUBE	:	
5.	ALAMAT KUBE	:	
6.	JENIS KELAMIN	:	
7.	JENIS USAHA KUBE	:	
8.	JABATAN DALAM KUBE	:	

12.	Apakah manfaat dari kelompok usaha bersama yang Bapak/ Ibu dapatkan ?
	Jawaban:

III RESPONDEN : (MANTAN KETUA/PENGURUS KUBE, TOKOH MASYARAKAT DAN PENDAMPING KUBE)

NO.	PERTANYAAN
	<b>KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TIDAK AKTIF</b>
1.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana awalnya pembentuksn KUBE tersebut ? Jawaban:
2.	Bagaimana status kepengurusanya ? Jawaban:
3.	Apa usaha ekonomi produktif kelompok tersebut ? Jawaban:
4.	Apakah kelompok usaha bersama tersebut mendapatkan pelatihan teknis sebelum melaksanakan usahanya ? Jawaban:
5.	Apakah kelompok tersebut juga mendapatkan bantuan dari program lain, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ? Jawaban:
6.	Bagaimana pembukuan dan catatan keuangan KUBE tersebut ? Jawaban:
7.	Apakah masalah atau kendala utama yang dihadapi KUBE tersebut hingga tidak aktif atau tidak produktif lagi ? Jawaban:
8.	Bagaimana peran pendamping dalam membantu mengatasi masalah tersebut ? Jawaban:
9.	Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah usaha kelompok lebih manfaat dari pada usaha sendiri atau sebaliknya ? Jawaban:
10.	Menurut pendapat Bapak/ Ibu bagaimana peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membantu kelompok usaha bersama ini ? Jawaban:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pelaksana program yang terlibat langsung adalah Kepala Dinas, Kabid, Kasie, Staf kegiatan dan para pendamping KUBE</li> </ul>
	b.Disposisi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tanggungjawab terhadap pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana program dipegang oleh Kepala Bidang sebagai pembuat komitmen yang bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran. Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi dan staf seksi yang bersangkutan</li> <li>• Koordinasi dan perintah atasan (pembuat komitmen) tidak jelas, sehingga program terkesan kurang tepat sasaran</li> <li>• Kurangnya tanggungjawab staf terhadap pelaksanaan program, dikarenakan staf kebanyakan tenaga honorer/PHL yang dikarenakan mereka tidak memahami tujuan dari program tersebut.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Staf atau personel pelaksana program sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan staf/personel baik secara kuantitas/kualitas</li> <li>• Latar belakang pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas, sehingga dedikasi terhadap tugas sangat kurang.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Kepatuhan terhadap perintah-perintah atasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penggabian perintah atau penyimpangan perintah dari atasan langsung, karena adanya kepentingan pribadi dan kelompok</li> <li>• Kurang tegasnya perintah atasan terhadap staf bawahannya/pelaksana</li> <li>• Adanya pengaruh birokrasi pemerintahan terhadap tujuan program</li> <li>• Adanya orientasi berpikir pada uang bukan pada program /tujuan program tersebut</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Unsur kepentingan dalam pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur kepentingan sangat mendominasi</li> <li>• Pelaksanaan program/ kegiatan masih berorientasi pada proyek</li> </ul>



### TRANSKRIP/RINGKASAN HASIL WAWANCARA

NO	VARIABEL/TOLAK UKUR	HASIL WAWANCARA
<b>1</b>	<b>Implementasi Program</b>	<b>Yang diwawancarai adalah :</b>
		1.Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2.Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		3. Kepala Seksi Fakir Miskin
		4. Kepala Seksi Perencanaan
		5.Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
		6. Staf Pemberdayaan Fakir Miskin
	<b>Tolak Ukur Yang Ditanyakan:</b>	<b>Ringkasan hasil Wawancara Sbb :</b>
	a. Proses	
	➤ Pedoman umum atau Juknis	• Tersedia namun belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya
	➤ Kejelasan dan kesesuaian Juknis dengan program yang dilaksanakan	• Juklak Juknis sudah jelas namun belum menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan program
	➤ Sarana atau Media yang digunakan dalam melaksanakan program	• Melalui Sosialisasi program yang dilakukan sebelum bimbingan teknis Kelompok
	➤ Pelaksanaan sesuai rencana, waktu, tempat dan sasaran	• Pelaksanaan program kurang sesuai dengan rencana awal, dan kurang tepat sasaran serta waktu pelaksanaan tidak sesuai jadwal. • Banyaknya kepentingan dari pelaksana dan pendamping dilupakan.
	➤ Pemahaman para pelaksana terhadap program	• Kurang paham dan mengerti terhadap program yang dijalankan sehingga program terkesan mengejar target atau sasaran sehingga tujuan dari program tersebut kurang maksimal dan belum mencapai hasil yang diinginkan yaitu . Kemiskinan menurun. Lapangan kerja baru terbuka. Pengganguran terserap Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan program hanya mengejar target/sasaran</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kewenangan dan koordinasi yang hirarki sehingga menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
	c. Sumber Daya	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jumlah staf/personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan tingkat pendidikan para pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Staf PNS sebanyak 3 orang, dan honorer 3 orang,</li> <li>▪ Tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 3 orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Diklat/ keahlian khusus bagi staf/pelaksana program</li> <li>❖ Bidang/seksi yang menangani program pemberdayaan masyarakat miskin</li> <li>❖ Fasilitas yang tersedia/yang mendukung program</li> <li>❖ Wewenang dalam pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada diklat /keahlian khusus bagi staf, sehingga kompetensi yang mereka miliki masih sangat minim.</li> <li>▪ Diklat hanya diadakan khusus untuk pendamping KUBE</li> <li>▪ Staf/pelaksana program berpedoman pada pedoman umum program pemberdayaan sosial yang dikeluarkan oleh Depsos</li> <li>▪ Program pemberdayaan masyarakat miskin berada pada bidang pemberdayaan sosial dengan seksi khusus pemberdayaan fakir miskin, sehingga program tersebut berkaitan erat dengan tupoksi seksi</li> <li>▪ Fasilitas yang mendukung program sudah tersedia, namun kemampuan staf dalam penggunaannya masih terbatas. Perangkat pengolahan data, mobil operasional dan insentif serta alat tulis kantor telah dialokasikan dalam menunjang pelaksanaan program tersebut.</li> <li>• Adanya kewenangan dan koordinasi yang hirarki sehingga menyebabkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Koordinasi dalam pelaksanaan program</li> <li>❖ Pemanfaatan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi tidak berjalan dengan baik. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kepentingan pribadi lebih terlihat</li> <li>• Keterlibatan antar bidang /bagian tidak ada</li> <li>• Program berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat</li> </ul>



		(implementor) kegiatan/ program terjadi setiap tahun. Sehingga timbul keterlambatan dan kepakuman kegiatan selama tenggang waktu pergantian.
2	<b>Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</b>	<b>Yang diwawancarai adalah :</b>
		1. Ketua KUBE yang produktif 2. Mantan Ketua KUBE yang tidak produktif
	<b>Tolak Ukur Yang Ditanyakan:</b>	<b>Ringkasan hasil Wawancara Sbb :</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Proses terbentuknya kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata kelompok usaha bersama (KUBE) terbentuk tahun 2006 sebanyak 60,00 persen dan tahun 2007 sebanyak 20,00 persen serta tahun 2008 dan 2009 sebanyak 20,00 persen.</li> <li>• Jumlah anggota KUBE pada saat terbentuk rata-rata 5 (lima) orang sebanyak 52,00 persen, 7 (tujuh) orang 10,00 persen dan 10 (sepuluh) orang 38,00 persen. Proses terbentuknya banyak yang dibentuk oleh</li> <li>• Jumlah anggota KUBE pada saat terbentuk rata-rata 5 (lima) orang sebanyak 52,00 persen, 7 (tujuh) orang 10,00 persen dan 10 (sepuluh) orang 38,00 persen. Proses terbentuknya banyak yang dibentuk oleh tenaga pendamping 40,00 persen, dibentuk dengan musyawarah anggota dan masyarakat sebanyak 40,00 persen, dibentuk oleh aparat desa (RT)/kelurahan 20,00 persen. Dari hasil wawancara terungkap bahwa KUBE-KUBE yang tidak aktif banyak yang dibentuk oleh pendamping KUBE, sehingga jelas keberadaan KUBE tersebut terbentuk secara mendadak, artinya ketika akan ada bantuan mereka segera membentuk kelompok usaha, sehingga KUBE-KUBE yang terbentuk secara</li> </ul>



		<p>sehingga jadwal pelaksanaan dan pengadaan bantuan tidak sesuai jadwal dan waktu yang telah direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala bidang/bagian lebih mendominasi pelaksanaan program.</li> <li>• Sarana komunikasi/ internet tidak dimanfaatkan dengan baik, buku pedoman atau juklak belum dijadikan patokan atau panduan dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
	d. Struktur Birokrasi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proses pengawasan</li> <li>○ Yang terlibat dalam pengawasan/evaluasi</li> <li>○ Koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan</li> <li>○ Keterlibatan Instansi/Lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan /pemeriksaan hasil kegiatan/program dilakukan oleh Irjen Depsos dan Ewasda Provinsi.</li> <li>▪ Pengawasan/monitoring dilakukan oleh para pelaksana kegiatan internal bidang</li> <li>▪ Kurang melibatkan bidang terkait internal Dinas Sosial</li> <li>▪ Pengawasan tidak dilakukan secara berjenjang</li> <li>▪ Kab/Kota kurang terlibat dalam pengawasan dan pembinaan kepada KUBE</li> <li>▪ Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengawasan</li> <li>▪ Proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dimana Dinas Sosial Kab/Kota dan Pendamping hanya sebatas terlibat dalam pengadaan bantuan kepada KUBE.</li> <li>▪ Tidak ada keterlibatan Instansi/lembaga lain dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan/program</li> <li>▪ Koordinasi dan pengawasan dengan instansi/lembaga lain belum terjalin dalam proses pengawasan/evaluasi.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelaksanaan SOP</li> <li>○ Hambatan/kendala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak adanya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan program sebagai patokan atau standarisasi ukuran keberhasilan</li> <li>▪ Kegiatan /program tersebut bersifat tahunan</li> <li>▪ Adanya pergantian para pelaksana</li> </ul>

		<p>sebanyak 65,00 persen sedangkan yang menjawab ada pelatihan sebanyak 35,00 persen, dengan bentuk pelatihannya berupa sosialisasi dan motivasi. yang dilaksanakan 1 (satu) kali sebelum bantuan disalurkan.</p>
	<p>✦ Pengadministrasian KUBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukuan dan catatan keuangan KUBE rata-rata kelompok menjawab belum ada 85,00 persen dan yang menjawab sudah ada sebanyak 15,00 persen. Pembukuan dan keuangan dibuat oleh ketua KUBE 60,00 persen dan bendahara 40,00 persen, sedangkan rutinas pertemuan anggota dalam sebulan rata-rata menjawab 1(satu) kali sebanyak 40,00 persen dan tidak ada menjawab 60,00 persen dengan alasan terlalu sibuk.</li> </ul>
	<p>✦ Masalah yang dihadapi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah utama yang dihadapi KUBE adalah masalah pembukuan 35,00 persen, masalah pemasaran 30,00 persen, dan masalah bahan baku 35,00 persen., serta masalah modal 10,00 persen. Sedangkan cara penyelesaian masalah tersebut adalah dengan cara diselesaikan bersama anggota kelompok sebanyak 45,00 persen, minta bantuan pendamping sebanyak 35,00 persen dan kerjasama dengan kelompok lain sebanyak 20,00 persen.</li> </ul>
	<p>✦ Pendampingan KUBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran pendamping dalam membantu masalah kelompok usaha bersama, rata-rata menjawab hanya sebatas memberikan motivasi 80,00 persen dan bimbingan 20,00 persen. Sedangkan intensitas pendampingannya rata-rata menjawab 1 (satu) kali sebulan sebanyak 70,00 persen, jarang atau tidak ada 10,00 persen dan kadang-kadang sebanyak 20,00 persen. Kemampuan pendamping memahami tugasnya</li> </ul>



		dadakan.
	✦ Keaktifan kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah anggota KUBE pada saat terbentuk rata-rata 5 (lima) orang sebanyak 52,00 persen, 7 (tujuh) orang 10,00 persen dan 10 (sepuluh) orang 38,00 persen. Proses terbentuknya banyak yang dibentuk oleh tenaga pendamping 40,00 persen, dibentuk dengan musyawarah anggota dan masyarakat sebanyak 40,00 persen, dibentuk oleh aparat desa (RT)/kelurahan 20,00 persen. Dari hasil wawancara terungkap bahwa KUBE-KUBE yang tidak aktif banyak yang dibentuk oleh pendamping KUBE, sehingga jelas keberadaan KUBE tersebut terbentuk secara mendadak, artinya ketika akan ada bantuan mereka segera membentuk kelompok usaha, sehingga KUBE-KUBE yang terbentuk secara dadakan.</li> </ul>
	✦ Usaha dan perkembangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis usaha KUBE dan kecocokan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah atau tempat usaha. Rata-rata menjawab sesuai dengan jenis usaha dan kondisi wilayah sebanyak 75,00 persen dan tidak sesuai sebanyak 25,00 persen. Dengan tingkat keaktifan anggota rata-rata 75,00 persen aktif untuk KUBE yang anggotanya 5 orang dan 25,00 persen untuk KUBE yang anggotanya 10 orang. Alasan tidak aktif karena sudah pindah tempat tinggal 10,00 persen, karena sibuk dengan usaha lain 40,00 persen, karena kekurangan modal 30,00 persen dan karena tidak ada kemajuan atau perkembangan 20,00 persen.</li> </ul>
	✦ Pelatihan yang diikuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan atau bimbingan yang diberikan kepada anggota kelompok sebelum bantuan diberikan, rata-rata menjawab tidak ada pelatihan</li> </ul>

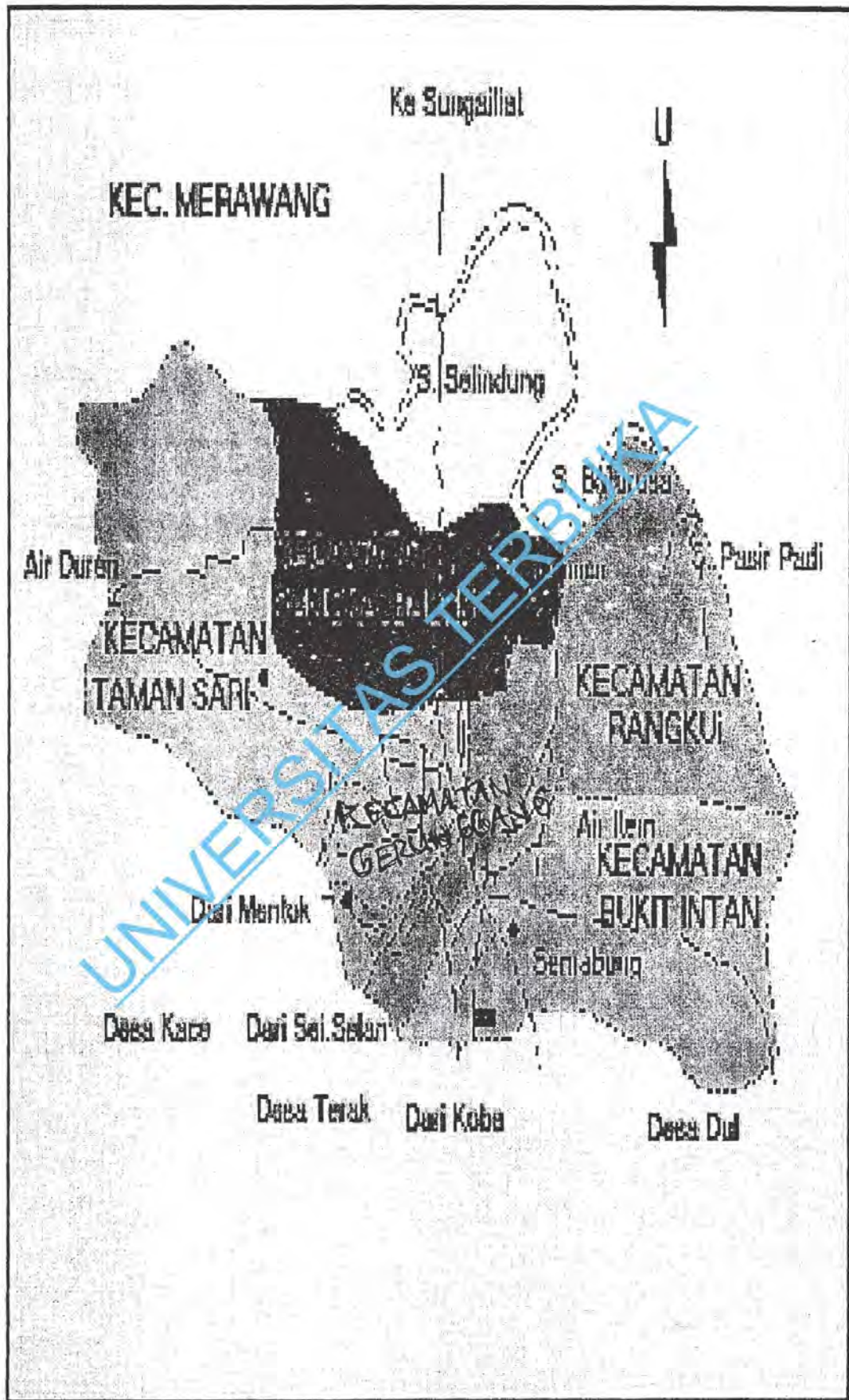


		<p>sebagai pendamping sebanyak 75,00 persen dan tidak memahami sebanyak 25,00 persen</p>
	<p>✦ Manfaat/dampak dari KUBE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebermanfaatn kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha sendiri dalam mengelola bantuan yang diberikan rata-rata menjawab bermanfaat secara kelompok sebanyak 60,00 persen dan secara individu sebanyak 40,00 persen. Alasan berkelompok karena bantuannya skala besar, mudah memecahkan masalah, kerugian ditanggung bersama, adanya kebersamaan dan gotongroyong. Sedangkan alasan usaha sendiri lebih dikarenakan sulit menyatukan prinsip yang berbeda dan terlalu banyak orangnya</li> </ul>
	<p>✦ Peran serta dan keterlibatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan ketidakterlibatan masyarakat miskin kedalam kelompok usaha bersama, lebih dikarenakan tidak tahu atau tidak mendapatkan informasi sebanyak 65,00 persen, karena alasan susah mengurus 10,00 persen, karena tidak ada yang membantu menguruskan 15,00 persen, tidak menjawab 10,00 persen.</li> <li>Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan terlihat bahwa masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE lebih meningkat kehidupan sosial ekonominya dibandingkan dengan masyarakat miskin yang belum tersentuh KUBE atau pernah tergabung dalam KUBE tetapi mengalami kegagalan. Dari 50 responden KUBE yang dijadikan sampel rata-rata menjawab kehidupan ekonomi mereka meningkat cukup baik.</li> </ul>

## II. RESPONDEN : (PENGURUS KUBE)

NO.	PERTANYAAN
	<b>KELOMPOK USAHA BERSAMA PRODUKTIF</b>
1.	Bagaimana proses terbentuknya KUBE Bapak/Ibu ? Jawaban:
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui potensi lokal yang ada di wilayah Bapak/Ibu ? Jawaban:
3.	Berapa jumlah anggota kelompok Bapak/Ibu yang masih aktif ? Kalau tidak aktif kenapa ? Jawaban:
4.	Apakah usaha Bapak/Ibu sebelumnya ? Ada usaha lain disamping usaha kelompok ? Jawaban:
5.	Apakah dengan usaha bersama ini usaha yang Bapak/Ibu jalankan semakin berkembang atau sebaliknya ? Jawaban:
6.	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan pelatihan teknis yang berkaitan dengan bidang usaha KUBE ? Jawaban:
7.	Apakah Bapak/Ibu mendapat bantuan juga dari program pemberdayaan masyarakat yang lain, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ? Jawaban:
8.	Apakah KUBE Bapak/Ibu sudah mempunyai pembukuan dan catatan keuangan KUBE ? Jawaban:
9.	Apa masalah atau kendala yang dihadapi oleh KUBE Bapak/Ibu ? Jawaban:
10.	Apakah pendamping berperan aktif dalam membantu pendampingan KUBE ? Jawaban:
11.	Bagaimana peran pendamping dalam mengatasi permasalahan KUBE yang dihadapi ? Jawaban:







**FOTO-FOTO/DOKUMENTASI**



